

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



ated the Great Place
y and fell in love with it.
to rebuild the village as a holiday

• • •

KABUPATEN KARO

• • •

2022

• • •

• • •



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARO**

The image shows the front cover of a report titled 'Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo 2022'. The title is written in large, bold, black capital letters at the top. Below the title, the text 'KABUPATEN KARO' and '2022' are also in bold black capital letters, separated by a series of dots. The cover is decorated with a collage of images: a family of six people standing together, a stack of Indonesian Rupiah banknotes (with '100000' visible), and three students in school uniforms. A watermark 'KATALOG : 4102002.1211' is in the top right corner, and a URL 'https://prokab.bps.go.id' is diagonally across the center. The background is a light gray with abstract shapes.

The image shows the front cover of a report titled 'Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo 2022'. The title is written in large, bold, black capital letters at the top. Below the title, the text 'KABUPATEN KARO' and '2022' are also in bold black capital letters, separated by a series of dots. The cover is decorated with a collage of images: a family of six people standing together, a stack of Indonesian Rupiah banknotes (with '100000' visible), and three students in school uniforms. A watermark 'KATALOG : 4102002.1211' is in the top right corner, and a URL 'https://prokab.bps.go.id' is diagonally across the center. The background is a light gray with abstract shapes.



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KARO TAHUN 2022

No. Publikasi : 12110.2322
Katalog : 4102002.1211
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 82 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Diterbitkan Oleh:

© BPS Kabupaten Karo

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik*

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KARO TAHUN 2022

Penanggung Jawab Umum :

Ratnauli Naibaho, SE, M.Si

Penanggung Jawab Teknis :

Hendra P Tondang, SST. MM.

Editor :

Hendra P Tondang, SST. MM.

Penulis dan Pengolah Data :

Marianti Rosanna Pasaribu, S.Si.

Desain/Layout :

Marianti Rosanna Pasaribu, S.Si.

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2022 (Metode Baru) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis singkat dan padat yang memuat hasil atau capaian pembangunan manusia di Kabupaten Karo yang mencakup aspek pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Kabupaten Karo yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2022” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Berastagi, November 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karo



Ratnauli Naibaho, SE, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Bab 1 Gagasan Pembangunan Manusia	
1.1 Ide Dasar.....	3
1.2 Definisi Pembangunan Manusia	4
1.3 Mengukur Pembangunan Manusia.....	5
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
Bab 2 Inovasi dalam Pengukuran Pembangunan Manusia	
2.1 Perubahan Metodologi IPM	11
2.2 Komponen IPM	16
2.3 Penyusunan IPM	20
Bab 3 Status Pembangunan Manusia	
3.1 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Karo	25
3.2 Posisi Kabupaten Karo	26
3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	32
Bab 4 Kemajuan Pembangunan Manusia	
4.1 Tren Terbaru Pembangunan Manusia: melalui Lensa IPM	39
4.2 Lompatan Status Pembangunan Manusia	41
4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik	42
4.4 Pendidikan Memperluas Peluang.....	47
4.5 Kenaikan Standar Hidup.....	50

Bab 5 Disparitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

5.1 Gambaran Umum Wilayah Sumatera Utara.....	55
5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur.....	56
5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Sumatera Utara	59
5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota ...	64

Bab 6 Kesimpulan

6.1 Kesimpulan Indeks Pembangunan Manusia.....	71
--	----

LAMPIRAN	73
-----------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	6
Gambar 2.1	Perbandingan IPM Metode Lama & Metode Baru... ..	14
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	27
Gambar 3.2	Umur Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2022	28
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2022	29
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2022	30
Gambar 3.5	Pengeluaran per Kapita di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2022	31
Gambar 3.6	Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022	33
Gambar 3.7	Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022	34
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Kabupaten Karo , 2017-2022	39
Gambar 4.2	Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum).....	44
Gambar 4.3	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo , 2017-2022.....	45
Gambar 4.4	Umur Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022	46
Gambar 4.5	Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Karo , 2018-2022.....	47

Gambar 4.6	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022	48
Gambar 4.7	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022.....	49
Gambar 4.8	Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun di Kabupaten Karo , 2018-2022	51
Gambar 4.9	Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022 (ribu rupiah)	52
Gambar 5.1	IPM Tertinggi dan Terendah menurut Kawasan di Sumatera Utara, 2022	57
Gambar 5.2	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2018-2022.....	59
Gambar 5.3	Perkembangan Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022.....	60
Gambar 5.4	Perkembangan Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022.....	61
Gambar 5.5	Perkembangan Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022.....	62
Gambar 5.6	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022	63
Gambar 5.7	Perbandingan IPM Kabupaten dengan Kota di Sumatera Utara Tertinggi dan Terendah, 2022.....	64
Gambar 5.8	Perbandingan IPM kabupaten dengan Kota di Sumatera Utara menurut Status IPM, 2022	66

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik.....	12
Tabel 2.2	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	13
Tabel 2.3	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	19
Tabel 2.4	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	21
Tabel 3.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	25
Tabel 3.2	IPM Kabupaten Karo dan Komponen, 2022.....	32
Tabel 3.3	Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022.....	35
Tabel 4.1	Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Karo , 2017-2022.....	40
Tabel 4.2	Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020-2022	41
Tabel 5.1	Penggolongan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Wilayah.....	55
Tabel 5.2	Persentase Status IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Kawasan, 2022.....	58

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022	75
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020	76
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2019	77
Lampiran 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2018	78
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2018	79
Lampiran 6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	80
Lampiran 7	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017-2022.....	81
Lampiran 8	IPM, Pertumbuhan IPM, Peringkat dan Status IPM menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022.....	82

BAB

1

Gagasan Pembangunan Manusia

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan perhitungan IPM, dengan metode baru dengan 3 komponen

K
O
M
P
O
N
E
N

1

Angka Harapan Hidup Saat Lahir

2

Angka Harapan Lama Sekolah
dan Rata-Rata Lama Sekolah

3

Pengeluaran Per Kapita

Gagasan Pembangunan Manusia

1.1 Ide Dasar

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report 1990).

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Tujuan akhir Pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan manusia akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Konsep Pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), Pembangunan manusia salah satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“aprocess of enlarging people’s choices”*). Dalam konsep

Pembangunan manusia, Pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan Pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan Pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran Pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara.

1.2 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan Jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala Pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan

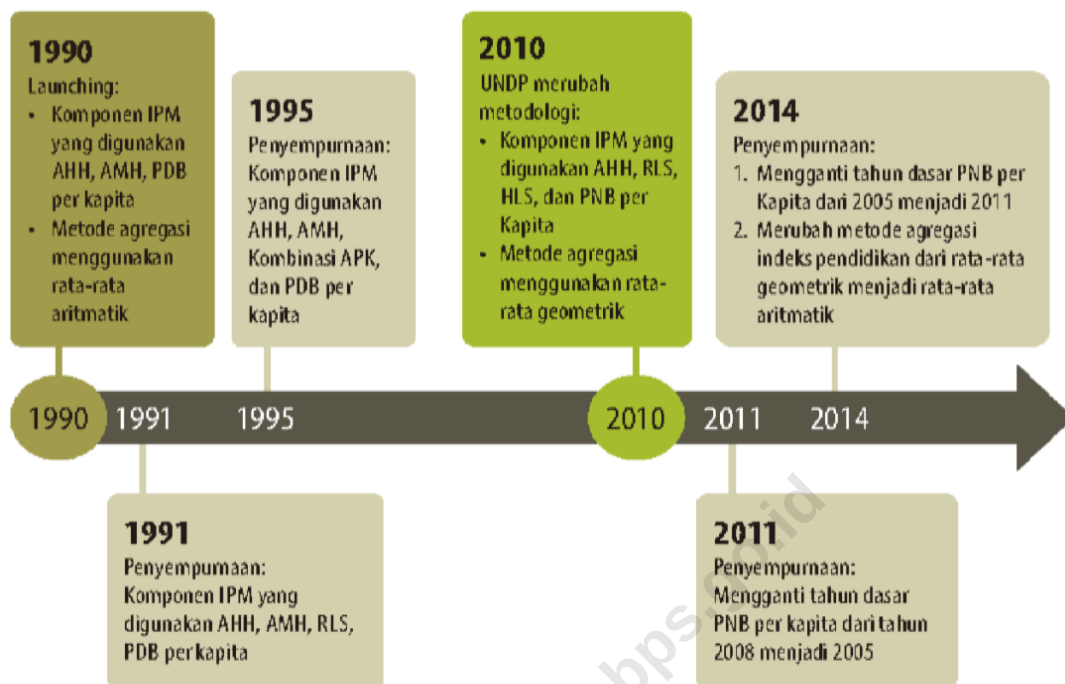
pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (*HDR 1990 halaman 10*).

1.3 Mengukur Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang populer pembangunan manusia. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup variable inti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/ indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Alat ukur ini diluncurkan oleh *Mahbub ulHaq* dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP).

Pada Human Development Report 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



Gambar 1.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP

Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat Lahir
AMH : Angka Melek Huruf
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar
HLS : Harapan Lama Sekolah
PNB : Produk Nasional Bruto

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks Pendidikan berubah dari rata-rata geometric menjadi rata-rata aritmatik.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

1. Angka Harapan Hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk).
2. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS).
3. PNB Per Kapita tidak tersedia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per Kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, yang dicerminkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Strategi tersebut yaitu peningkatan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi). Strategi bidang pendidikan, yang dapat dikembangkan yaitu peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari Pendidikan anak usia dini

sampai wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya yaitu pengembangan Lembaga jaminan sosial, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas-prioritasnya yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya meliputi tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, tenaga kerja (*employment*), kesehatan dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan analisis IPM Kabupaten Karo metode baru Tahun 2022. Untuk melihat perkembangan IPM secara lebih utuh, menyajikan kondisi sosial ekonomi, perkembangan IPM dan komponennya, kemajuan pembangunan manusia dan disparitas pembangunan manusia antar wilayah di yang berdekatan dengan Kabupaten Karo .

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 menyajikan ide dasar penulisan yang menguraikan manfaat peningkatan kualitas modal manusia dalam pembangunan daerah. Inovasi dalam pengukuran pembangunan manusia akan disajikan pada Bab 2, yaitu bab yang menguraikan tentang perubahan metodologi IPM metodebaru dan juga Komponen Perhitungan IPM. Selanjutnya pada Bab 3 akan disajikan status pembangunan manusia Kabupaten Karo. Kemajuan pembangunan Kabupaten Karo akan disajikan pada Bab 4 beserta analisis dan pembahasan secara deskriptif. Dan Bab 5 yang menguraikan disparitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo. Terakhir, Bab 6 Kesimpulan.

BAB 2

Inovasi Dalam Pengukuran Pembangunan Manusia

Metode Lama

Metode Baru

Angka Harapan Hidup Saat Lahir
(AHH)



Angka Harapan Hidup Saat Lahir
(AHH)

Angka Melek Huruf + Rata-Rata Lama
Sekolah 15+



Harapan Lama Sekolah + Rata-Rata
Lama Sekolah 25+

27 Komoditas PPP



96 Komoditas PPP

Rata-Rata Aritmatik



Rata -Rata Geometrik

Reduksi Shortfall



Pertumbuhan Aritmatik

2.1 Perubahan Metodologi IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diperkuat oleh dua hal mendasar.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur Pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat Pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitive membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh factor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan factor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah.

Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2 + 3 + 4) / 3 = 3$. Padahal secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan manusia.

Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini

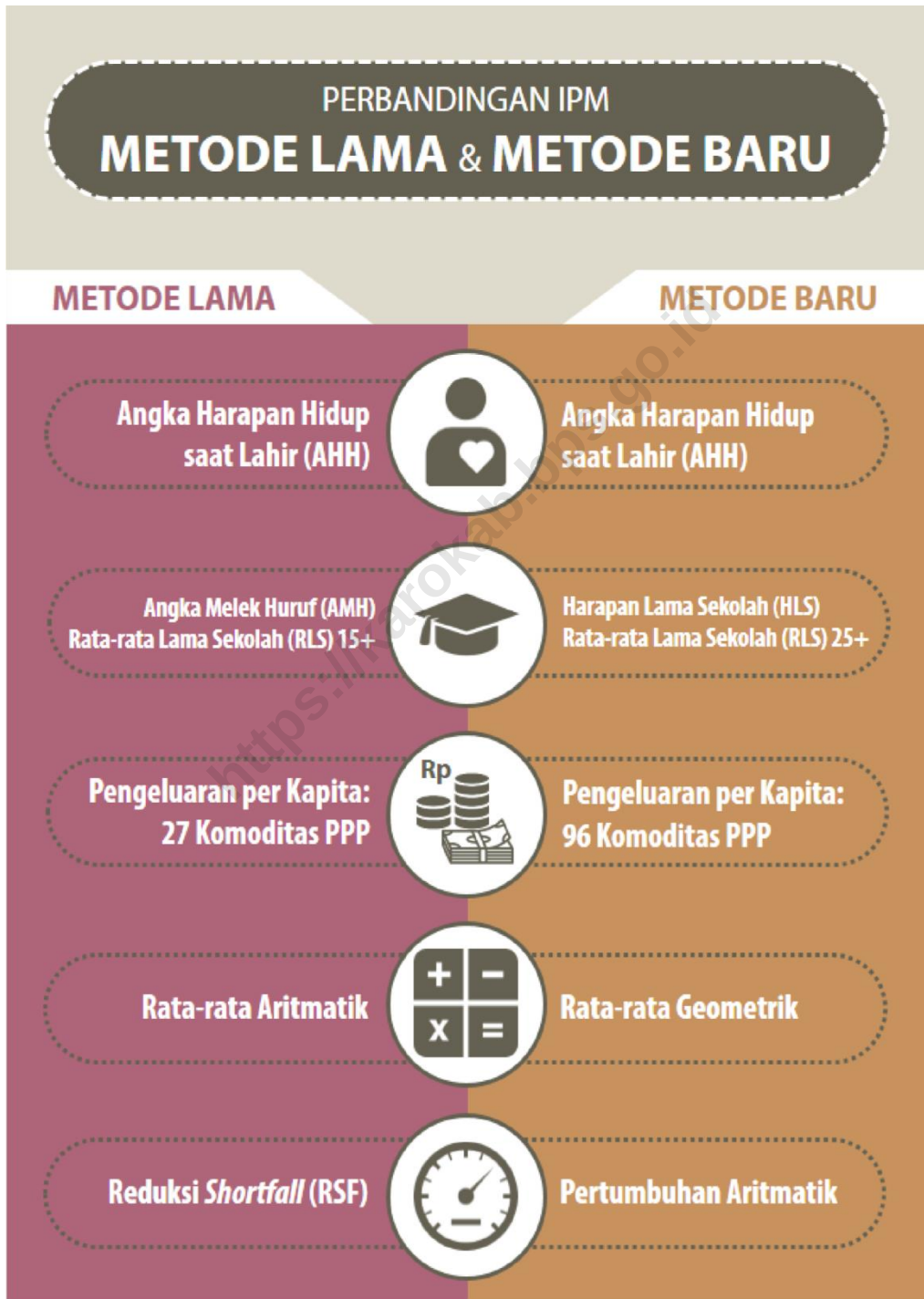
digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	• Angka Melek Huruf (AMH) • Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	• Harapan Lama Sekolah (HLS) • Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Berbeda pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitive terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata geometric menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.

Gambar 2.1 Perbandingan IPM Metode Lama & Metode Baru



Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. **Pertama**, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat disbandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

2.2Komponen IPM

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*).

Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

b. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

b.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun keatas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 keatas tidak bersekolah

lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun keatas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat disbanding pengeluaran per kapita, namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Saat ini BPS masih menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2.4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel 2.3 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketelapohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/ pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi

Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakardll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

2.3 Penyusunan IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{maxmin})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu focus dalam pembangunan manusia. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan *reduksi short fall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (7)$$

Keterangan:

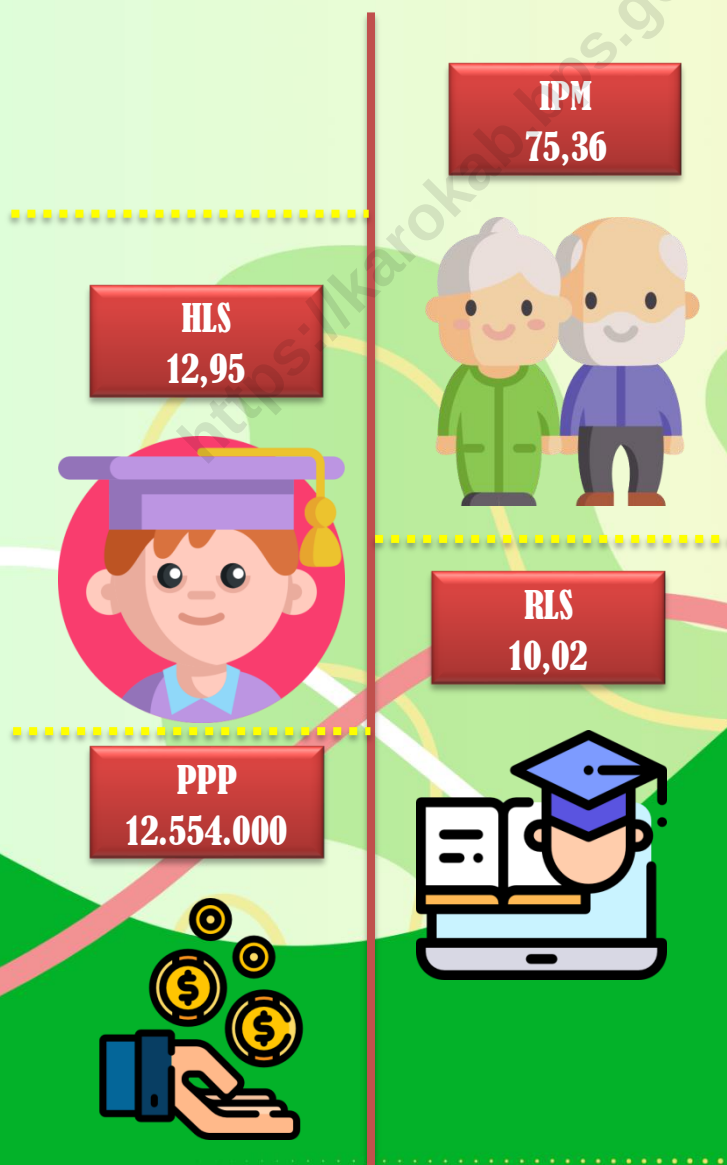
IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

BAB

3

Status Pembangunan Manusia



Status Pembangunan Manusia

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status Pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan atau pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah seperti Kabupaten/Kota atau provinsi serta perbandingannya dengan pencapaian di wilayah lain juga dapat dianalisis.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 3.1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo mencapai 75,36 pada tahun 2022. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Karo berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Angka ini menunjukkan peningkatan IPM yang tidak terlalu jauh

dengan Tahun 2021, capaian ini mengantarkan Kabupaten Karo pada posisi delapan dari 33 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kabupaten Karo pada tahun 2022 mencapai usia 72,03 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun keatas di Kabupaten Karo telah menempuh pendidikan hingga 10,02 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas I. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia Pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13 tahun atau mencapai Diploma I.

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Karo sebesar 12,554 juta rupiah per tahun.

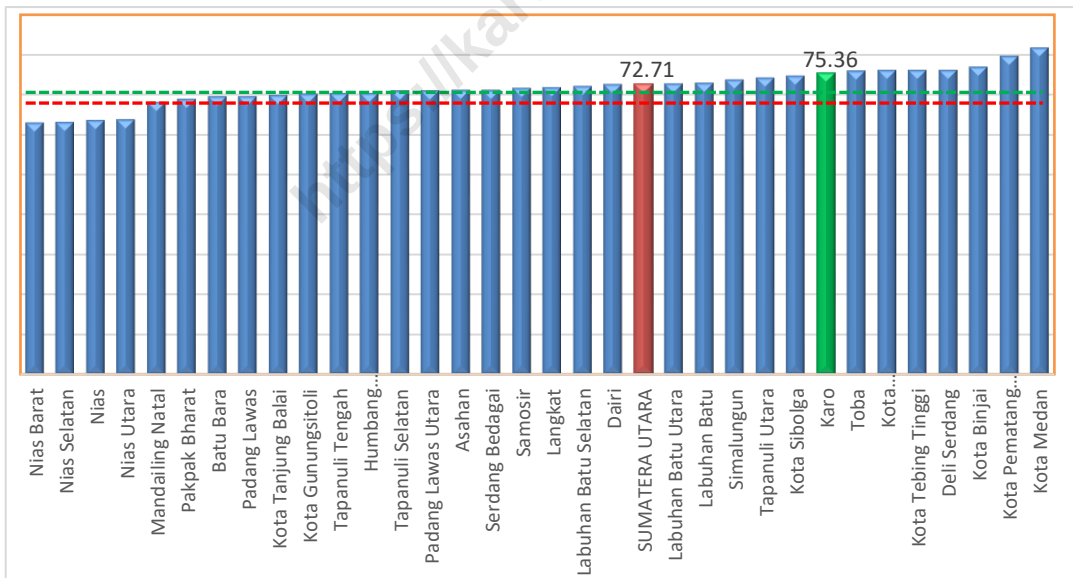
3.2 Posisi Kabupaten Karo

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara, di Tahun 2022 ini Kabupaten Karo berada pada posisi kedelapan (8) dari 33 Kabupaten/Kota. Sama dengan di Tahun 2021, capaian IPM Kabupaten Karo juga berada pada posisi delapan dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Kabupaten Karo meningkat lebih cepat dibandingkan Kabupaten Tapanuli Tengah yang meningkat sebanyak 0,38 dalam setahun, sedangkan Kabupaten Karo meningkat 0,53 dalam setahun.

Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia di Kota Medan telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Disusul oleh Kota Pematang Siantar dan Kota Binjai yang juga telah masuk pada kategori “tinggi”. Ketiga kota inilah yang menduduki peringkat 1,2 dan 3 IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara yang berada pada satu wilayah pulau yang sama telah memasuki IPM dengan kategori “sedang”. Tetapi berbeda dengan Kota Gunung Sitoli yang telah masuk kategori “tinggi” di tahun 2022. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki kategori IPM “tinggi”, dan tidak ada lagi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada pada kategori pembangunan manusia “rendah”.

**Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota, 2022**



IPM Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 75,36, lebih tinggi dibanding Kabupaten Dairi yang wilayahnya berada paling dekat dengan Kabupaten Karo ,yaitu 72,56. Walaupun di tingkat Provinsi IPM Kabupaten Karo menduduki rangking ke 8 sama

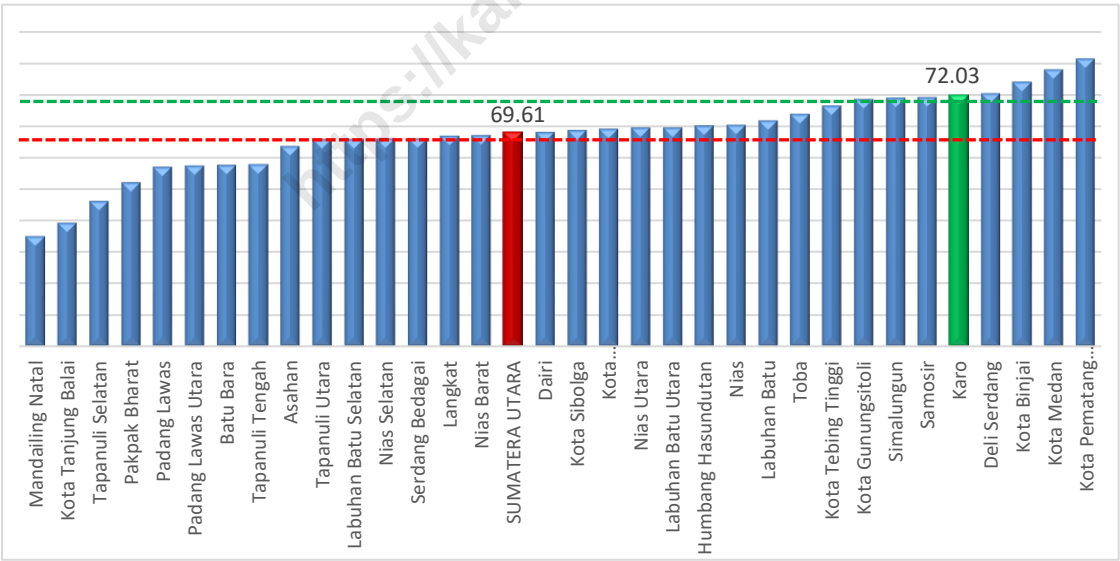
dengan tahun sebelumnya, namun angka IPM Kabupaten Karo ini telah mengalami peningkatan yang cukup lumayan.

a. Umur Harapan Hidup

Dimensi umur Panjang dan hidup sehat diwakili oleh Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Angka harapan hidup Kabupaten Karo tahun 2022 yaitu 72,03 tahun, diatas angka Provinsi Sumatera Utara yaitu 69,61 tahun dan Kabupaten Dairi sebagai tetangganya yang mencapai 69,64 tahun.

Umur Harapan Hidup tertinggi berada di Kota Pematang Siantar yang mencapai 74,25 tahun dan disusul oleh Kota Medan yang mencapai 73,58 tahun. UHH Kabupaten Karo berada di urutan ke 5 dari 33 seluruh Kabupaten/Kota, dan peringkat ini masih sama dengan peringkat UHH Kabupaten Karo pada tahun 2020 lalu.

Gambar 3.2Umur Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2022

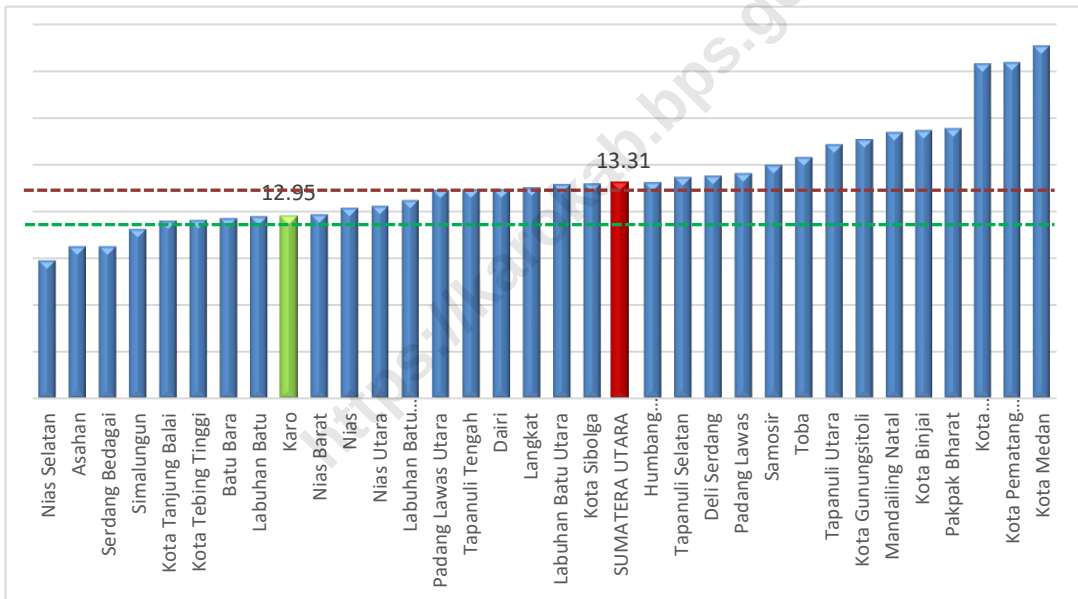


UHH Kabupaten Karo adalah nomor 5 tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara, dan UHH terendah berada di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu 63,05 tahun. Diharapkan angka harapan hidup Kabupaten Karo dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

b. Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo pada Tahun 2022 mencapai 12,95 tahun. Meski tetap perlu terus ditingkatkan, harapan lama sekolah di Kabupaten Karo sudah mendekati angka Provinsi dengan HLS sebesar 13,31 tahun. HLS Kabupaten Karo berada pada peringkat menengah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara, yaitu peringkat ke 26.

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2022



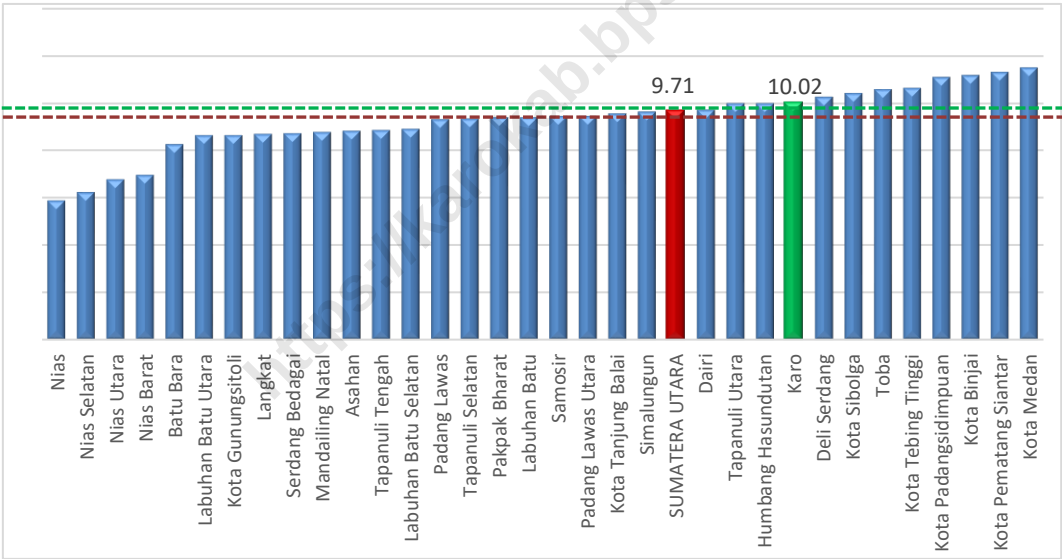
Angka ini memang mengalami peningkatan sebanyak 0,18 dibandingkan dengan HLS tahun 2021 lalu, yaitu 12,77. Tetapi jika di peringkatkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara, HLS Kabupaten Karo di Tahun 2022 masih tetap, yaitu peringkat ke 26, dibandingkan di Tahun 2021.

Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu mencapai 14,77 tahun adalah Kota Medan, yang disusul oleh Kota Pematang Siantar dengan HLS

14,59, sedangkan HLS terendah di Provinsi Sumatera Utara yang hanya 12,48 tahun adalah Kabupaten Nias Selatan.

Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Karo telah bersekolah selama 10,02 tahun atau mencapai SMA kelas I. Pada tahun 2021 lalu RLS Kabupaten Karo juga berada diatas angka RLS Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,58. Sama halnya di tahun 2022, RLS Provinsi Sumatera Utara berada dibawah RLS Kabupaten Karo 9,71, dimana di Tahun ini RLS Kabupaten Karo adalah 10,02.

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2022

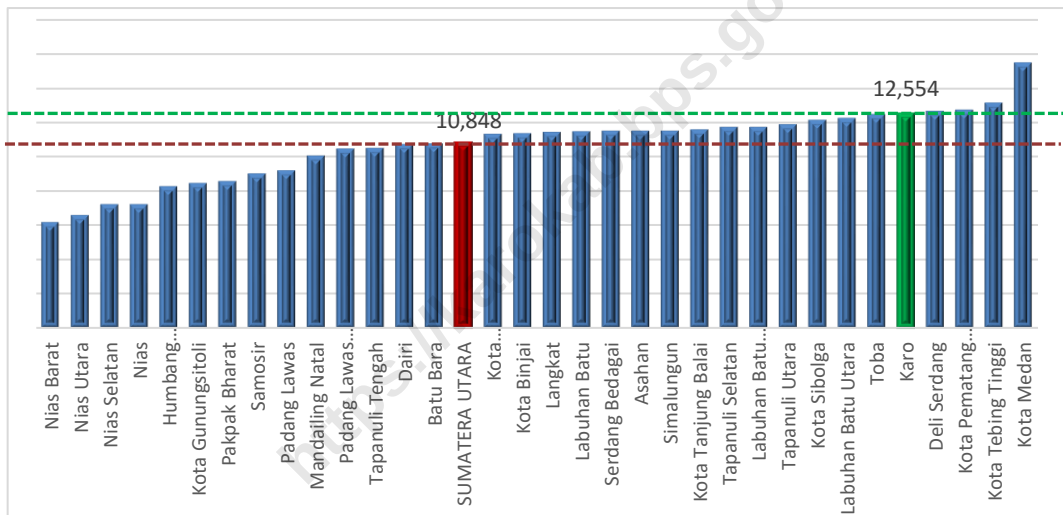


RLS Kabupaten Karo berada di urutan ke-9 dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. RLS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 11,50 tahun yaitu Kota Medan, sedangkan RLS terendah se Sumatera utara di tahun 2022 adalah Kabupaten Nias dengan RLS 5,88.

c. Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Di tahun 2022 Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Kabupaten Karo sebesar 12.554 juta rupiah per tahun. Angka ini cukup tinggi karena masih tetap berada diatas angka PPP Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 10,848 juta rupiah.

Gambar 3.5 Pengeluaran per kapita di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2022 (juta rupiah)



PPP di Kabupaten Karo berada di urutan kelima dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, sama dengan tahun 2021 lalu, pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Medan yaitu mencapai 15.503 juta rupiah per tahun, disusul oleh Kota Tebing Tinggi yang mencapai 13.144 dan Kota Pematang Siantar pada peringkat ke 3 dengan PPP mencapai 12.744. Sedangkan PPP terendah adalah di Kabupaten Nias Barat yang hanya 6.152 juta rupiah per kapita per tahun.

3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun keatas di Kabupaten Karo telah menempuh Pendidikan hingga 10,02 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas I. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia Pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,95 tahun atau mencapai Diploma I.

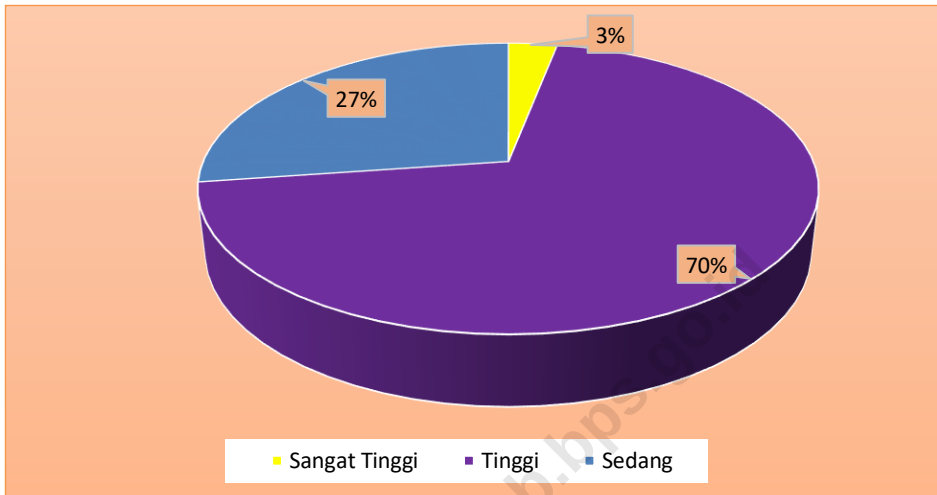
Tabel3.2 IPM Kabupaten Karo dan Komponen, 2022

Komponen		Nilai
	Umur harapan Hidup Saat Lahir/UHH (Tahun)	72,03
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,95
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,02
	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	Rp. 12.554.000
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		75,36

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Karo sebesar 12,554 juta rupiah per tahun.

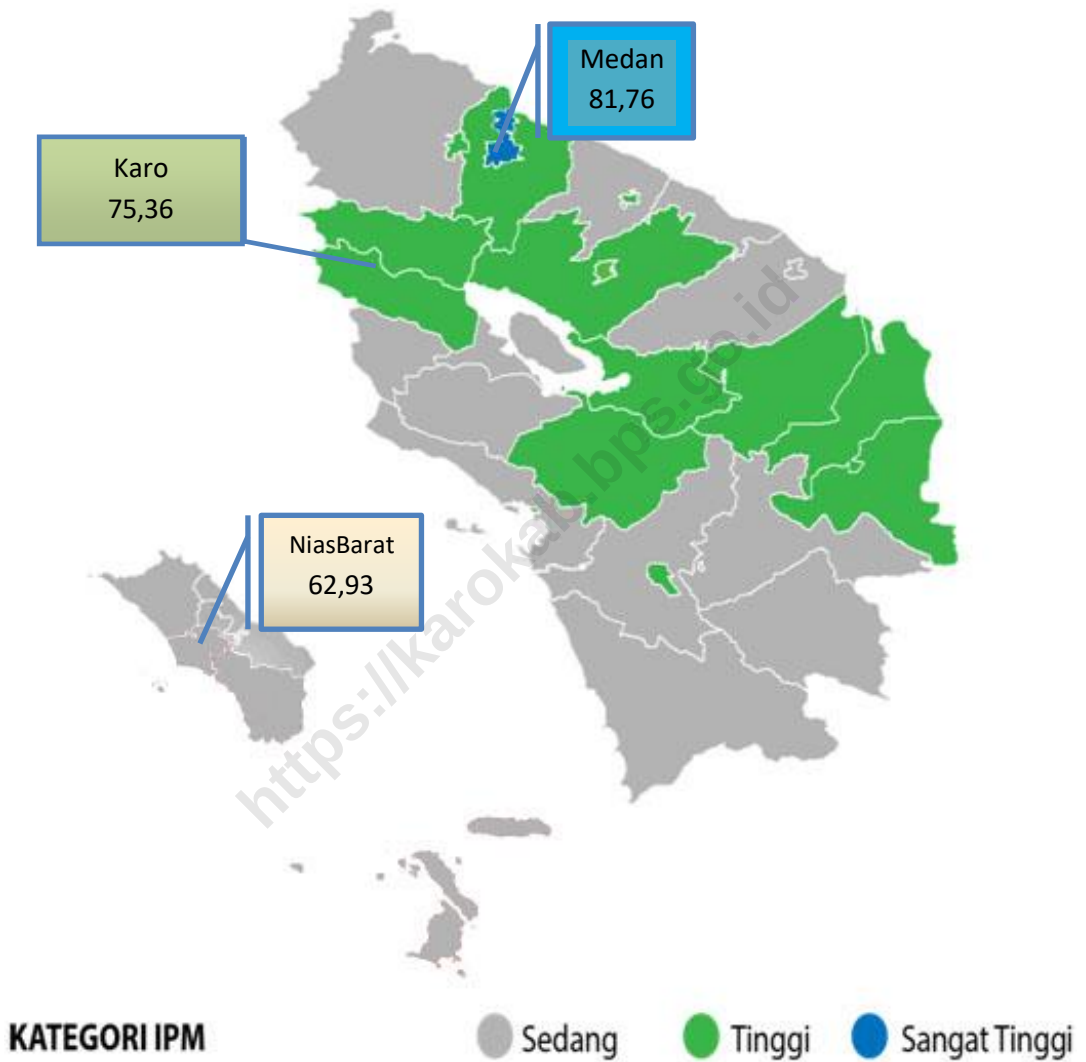
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karo pada tahun 2022 telah mencapai 75,36 dan masih berstatus “tinggi”. Pada tingkat Kabupaten/Kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 81,76. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat yaitu sebesar 62,93.

Gambar 3.6 Persentase Status Pembangunan Manusia Menurut Status di Provinsi Sumatera Utara, 2022



Sebagian besar yaitu 69,70 persen status pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara telah berhasil mencapai status “tinggi”. Kurang dari sepertiga (27,3 persen) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang masih berstatus pembangunan manusia “sedang”. Dan ada satu Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi” (3,03 persen). Serta tidak ada lagi Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori pembangunan manusia “rendah” tahun 2022.

**Gambar 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022**



Pada tahun 2022, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sudah ada 1 kota yang mencapai kategori “sangat tinggi”. Kemudian terdapat 23 Kabupaten/Kota yang telah mencapai kategori "Tinggi" dan 9 Kabupaten/Kota yang berada pada kategori "Sedang".

Sementara tidak ada lagi Kabupaten/Kota di kategori "Rendah". Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2021 lalu. Berbicara mengenai status pembangunan manusia, perubahan status pembangunan manusia merupakan hal yang diharapkan.

Tabel 3.3 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022

Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang
Medan	Kota Pematang Siantar	Kota Tanjung Balai
	Kota Binjai	Batu Bara
	Deli Serdang	Padang Lawas
	Kota Tebing Tinggi	Pakpak Barat
	Toba Samosir	Mandailing Natal
	Padang Sidempuan	Nias Utara
	Karo	Nias
	Tapanuli Utara	Nias Selatan
	Kota Sibolga	Nias Barat
	Simalungun	
	Labuhan Batu	
	Labuhan Batu Utara	
	Labuhan Batu Selatan	
	Dairi	
	Langkat	
	Samosir	
	Serdang Bedagai	
	Tapanuli Selatan	
	Asahan	
	Padang Lawas Utara	
	Kota Gunung Sitoli	
	Humbang Hasundutan	
	Tapanuli Tengah	

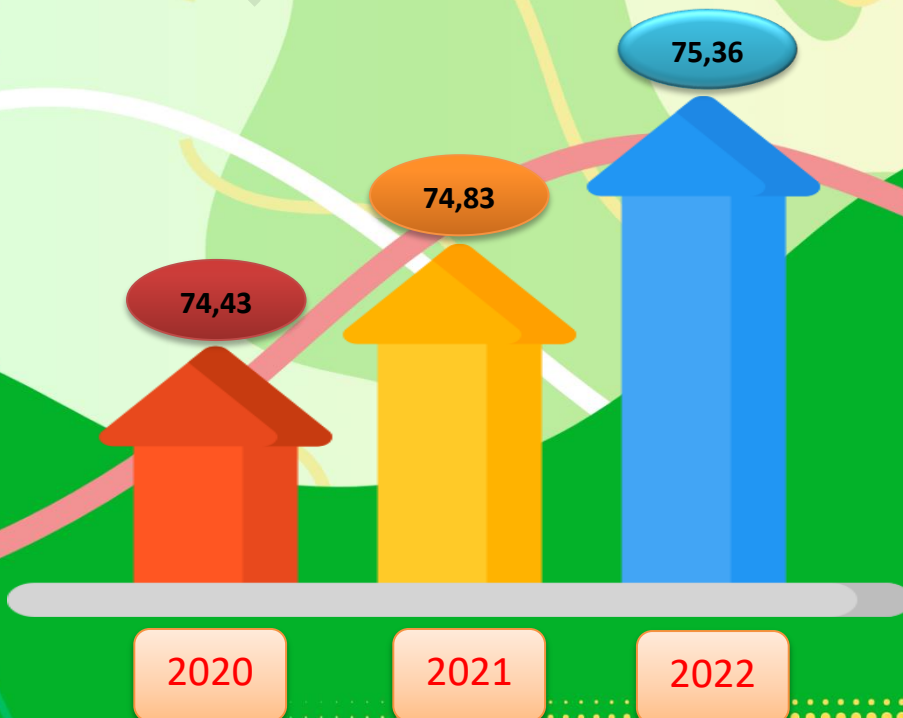
BAB

4

Kemajuan Pembangunan Manusia

Tren IPM

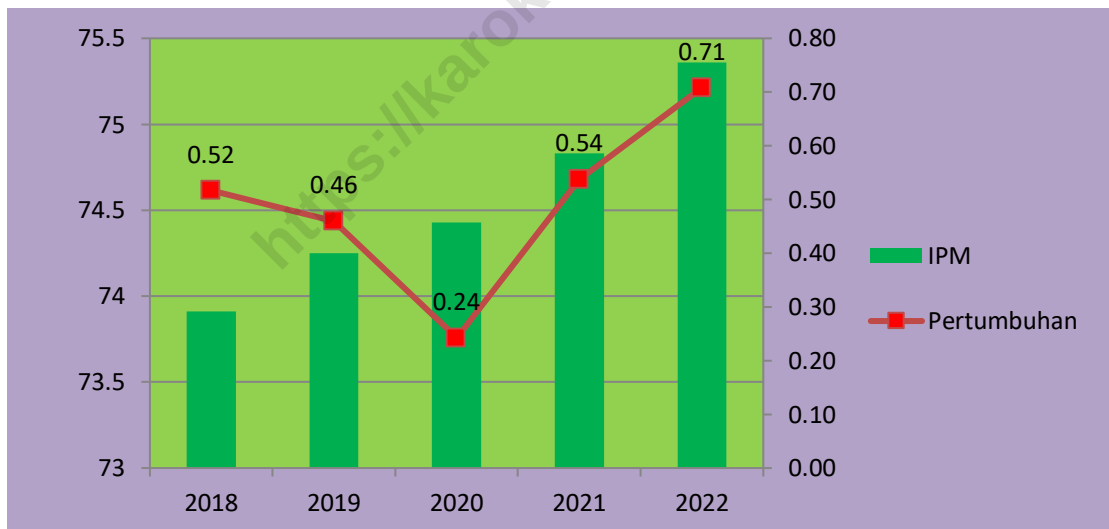
- Kabupaten Karo
- Selama 3 Tahun Terakhir



4.1 Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia : Melalui Lensa IPM

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 73,91 terus meningkat menjadi 75,36 pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kabupaten Karo terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,49 persen per tahun.

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Karo, 2018-2022 (%)



Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Seluruh Kabupaten/Kota menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2018 hingga 2022. Beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Setidaknya, tiga Kabupaten/Kota mencatat perkembangan paling cepat selama 2018 hingga 2022.

Kabupaten/Kota dengan pembangunan manusia tercepat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara.

Dari grafik perkembangan IPM Kabupaten Karo ini, terlihat bahwa IPM Kabupaten Karo memang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan selisih pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 0,71 persen, sedangkan pertumbuhan dari tahun 2020 ke 2021 hanya sebesar 0,54 persen, dari tahun 2019 ke 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,24 persen. Pertumbuhan IPM Kabupaten Karo Tahun 2022 merupakan kenaikan pertumbuhan yang paling tinggi.

Dengan nilai IPM sebesar 75,36 pada tahun 2022, maka status IPM Kabupaten Karo berada pada tingkatan Tinggi. Adapun perkembangan dari masing-masing komponen penyusun IPM di Kabupaten Karo tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kab. Karo Tahun 2018–2022

No .	Komponen Penyusun IPM	2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,97	71,27	71,40	71,58	72,03
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,73	12,75	12,76	12,77	12,95
3	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp.)	12 367	12 474	12 349	12 412	12 554

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo

4.2 Lompatan Status Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa wilayah telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara. Ketiga Kabupaten ini menjadi Kabupaten/Kota dengan pembangunan manusia tercepat di Sumatera Utara.

Selain pembangunan manusia yang terus tumbuh, perkembangan pembangunan manusia juga dilihat dari perkembangan status pembangunan manusia. Beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang mengagumkan selama kurun waktu 2018 hingga 2022. Sebagian berhasil meningkatkan status pembangunan manusia setingkat lebih tinggi. Dalam kurun waktu 1 tahun, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang di tahun 2022 berhasil meningkat ke status “tinggi” dari status “sedang”.

Kabupaten Karo dari tahun 2022 status “tinggi” juga masih mempertahankan status pembangunan manusia dimana Kabupaten Karo mengalami pertumbuhan pembangunan manusia sebesar 0,71 persen tahun 2022, dan status IPM nya pada tahun ini masih berada pada status “tinggi”.

Tabel 4.2 Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021-2022

Kabupaten/Kota	Status IPM 2021	Status IPM 2022
Kota Gunung Sitoli	Sedang	Tinggi
Kabupaten Tapanuli Tengah	Sedang	Tinggi
Kabupaten Humbang Hasundutan	Sedang	Tinggi

4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, salah satu faktornya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator UHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbidity). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

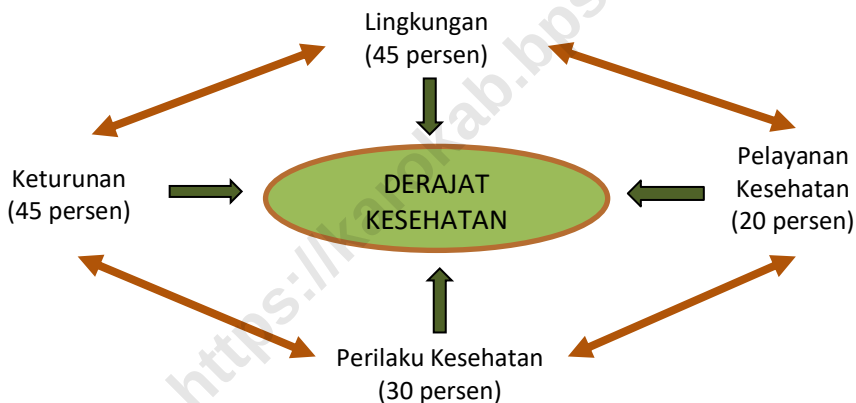
Morbidity adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi morbidity berarti semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada usia harapan hidup dan tingkat mortalitas.

Berdasarkan data Susenas tahun 2022, angka morbidity penduduk di Sumatera Utara adalah 8,78 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 12,24 persen. Kabupaten Karo angka morbidity turun di tahun 2022 yaitu sebesar 0,27 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Karo khususnya naik dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan teori Henrik L. Blum, tingkat mortalitas dan morbidity penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor *lingkungan*, *perilaku kesehatan*, *pelayanan kesehatan*, dan *keturunan*. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen.

Sedangkan perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat factor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan factor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjodkk ,1997). Berikut ilustrasi mengenai konsep Henrik L. Blum mengenai hubungan antara derajat kesehatan dengan keempat faktor determinannya.

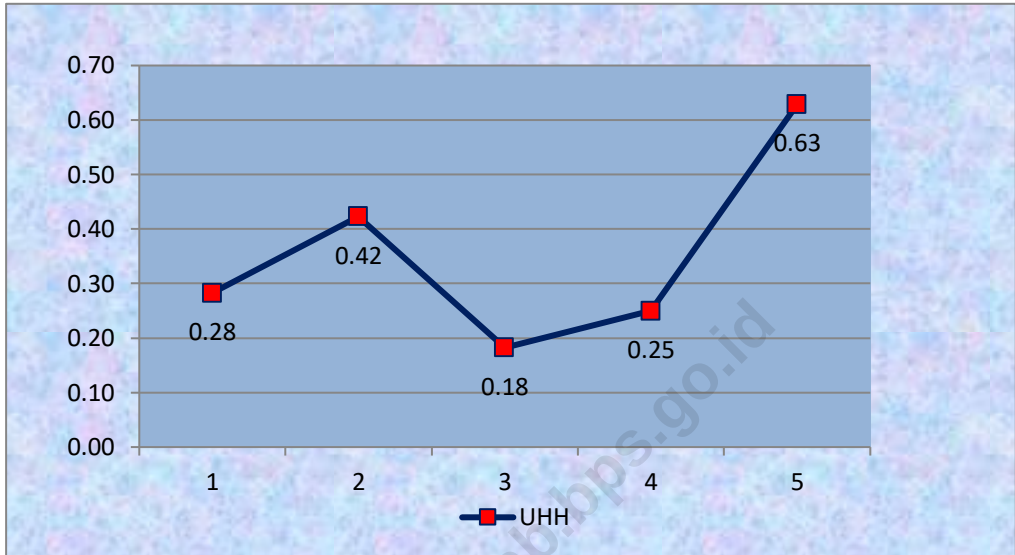
Gambar 4.2 Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)



Sumber : Kementerian Kesehatan RI

UHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

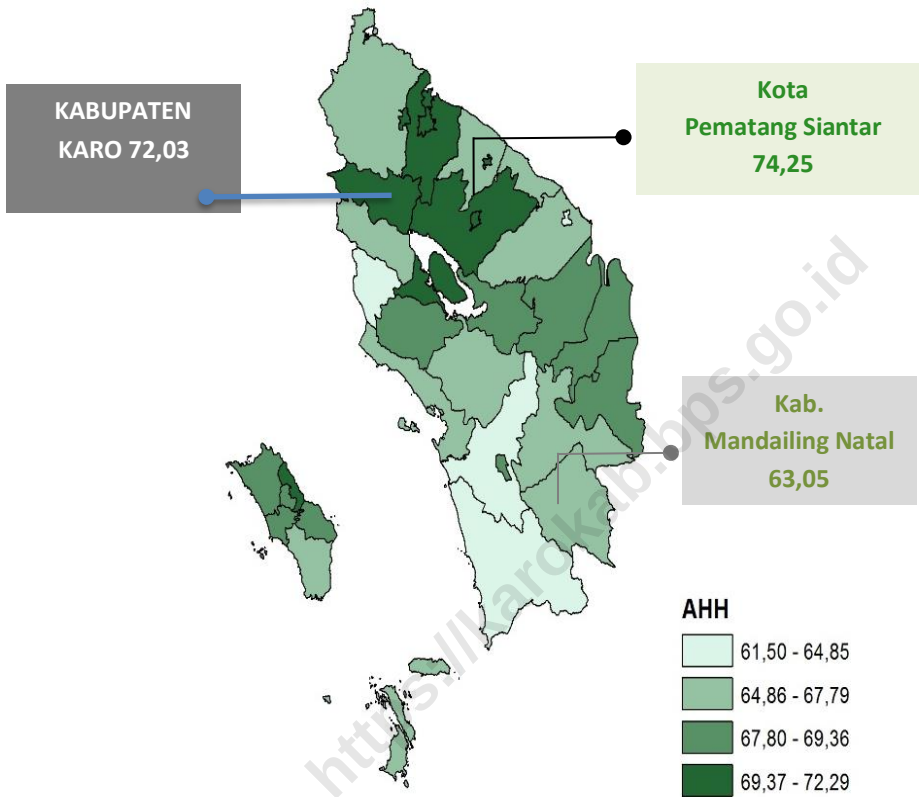
Gambar 4.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo, 2018-2022



Gambar 4.3 memperlihatkan perkembangan pertumbuhan UHH Kabupaten Karo selama kurun waktu empat tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa UHH Kabupaten Karo selama periode 2018 - 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Akan tetapi mengalami penurunan pertumbuhan UHH tahun 2020

Pada Tahun 2022, perkembangan pertumbuhan UHH Kabupaten Karo mengalami kenaikan yaitu selisihnya dengan tahun 2021 mencapai 0,38. Berarti setiap bayi di Kabupaten Karo yang dilahirkan pada tahun 2022, dapat berharap untuk hidup sampai usia 72,03 tahun. Selama tahun 2018-2022, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Karo tumbuh rata-rata 0,35 persen per tahun.

Gambar 4.4 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022



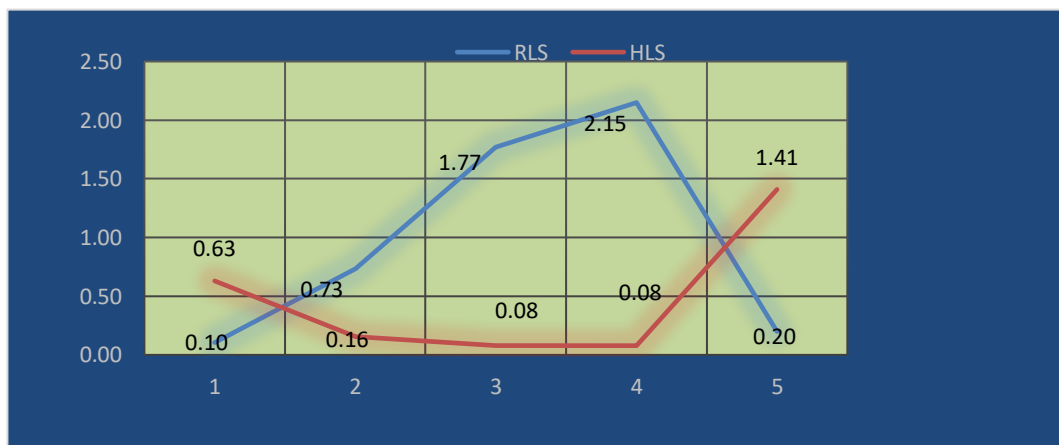
Variasi angka harapan hidup berkisar dari 63,05 tahun hingga 74,25 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Pematang Siantar. Sementara angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Karo sendiri berada pada peringkat ke-5 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, atau Kabupaten Karo berada pada peringkat no.5 dari atas. Ini berarti sudah tinggi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Karo .

4.4 Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan memperluas peluang seseorang, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan kecenderungan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan secara umum juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek social ekonomi. Oleh karena itu, Pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat Pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan Pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang Pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

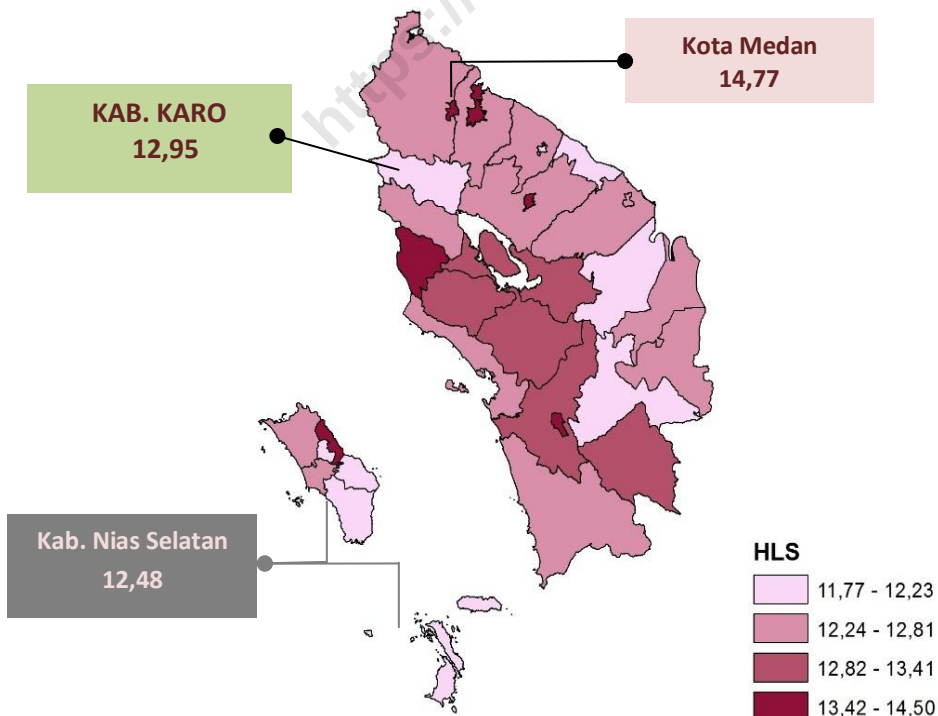
Gambar 4.5 Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Karo Tahun 2018-2022



Sampai dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas di Kabupaten Karo telah mencapai 10,02 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia Pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,95 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat.

Pada tahun 2018, harapan lama sekolah di Kabupaten Karo sebesar 12,73 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 12,95 tahun pada tahun 2022. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2018 sebesar 9,55 tahun meningkat hingga 10,02 tahun pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 0,99 persen per tahun, lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan harapan lama sekolah yang tumbuh 0,47 persen per tahun.

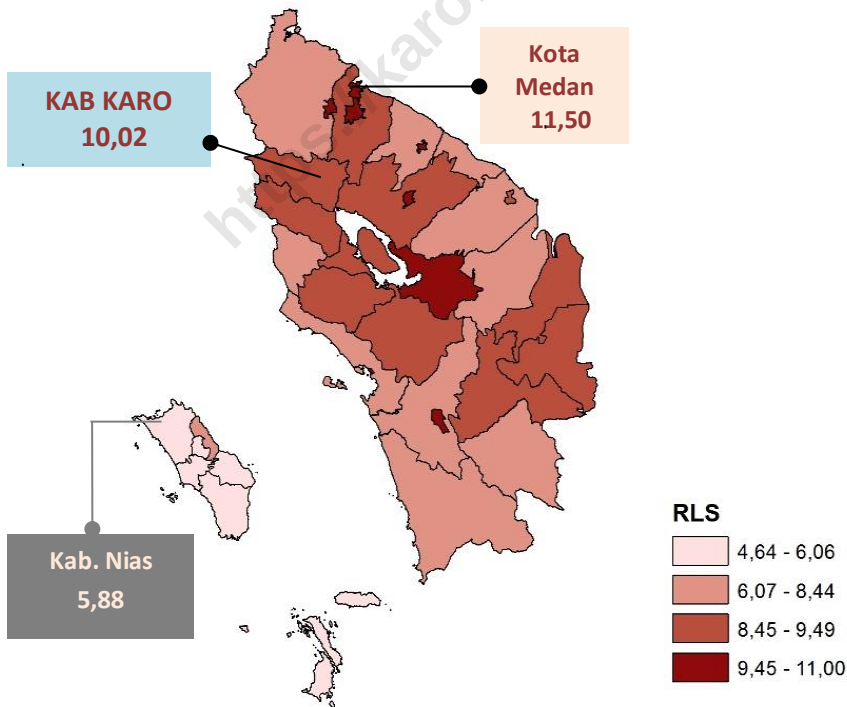
Gambar 4.6 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022



Pada tahun 2022, harapan lama sekolah di Sumatera Utara berkisar antara 12,48 tahun hingga 14,77 tahun. Harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan yaitu selama 14,77 tahun. Sementara harapan lama sekolah terendah di Kabupaten Nias Selatan yaitu hanya selama 12,48 tahun.

Pertumbuhan angka harapan lama sekolah tahun 2021-2022 di level Kabupaten/Kota cukup beragam. Kabupaten Batu Bara tumbuh paling cepat dengan pertumbuhan sebesar 2,29 persen. Kabupaten Karo sendiri berada pada peringkat 26 untuk Harapan Lama Sekolah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 4.7 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022



Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo tahun 2022 mencapai hingga 10,02 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan yaitu 11,50 tahun. Sementara terendah di Kabupaten Nias yaitu penduduk umur 25 tahun keatas dengan rata-rata lama sekolah hanya selama 5,88 tahun atau sekitar kelas 5 SD.

Kabupaten Toba merupakan Kabupaten/Kota pertumbuhan rata-rata lama sekolah paling lambat di Sumatera Utara yaitu sebesar 0,09 persen. Jika dilihat dari perkembangannya, selama kurun waktu 2021-2022 rata-rata lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Nias dengan pertumbuhan sebesar 4,25 persen dan pertumbuhan tertinggi kedua dicapai Kabupaten Nias Barat dengan pertumbuhan 4,19 persen.

4.5 Kenaikan Standar Hidup

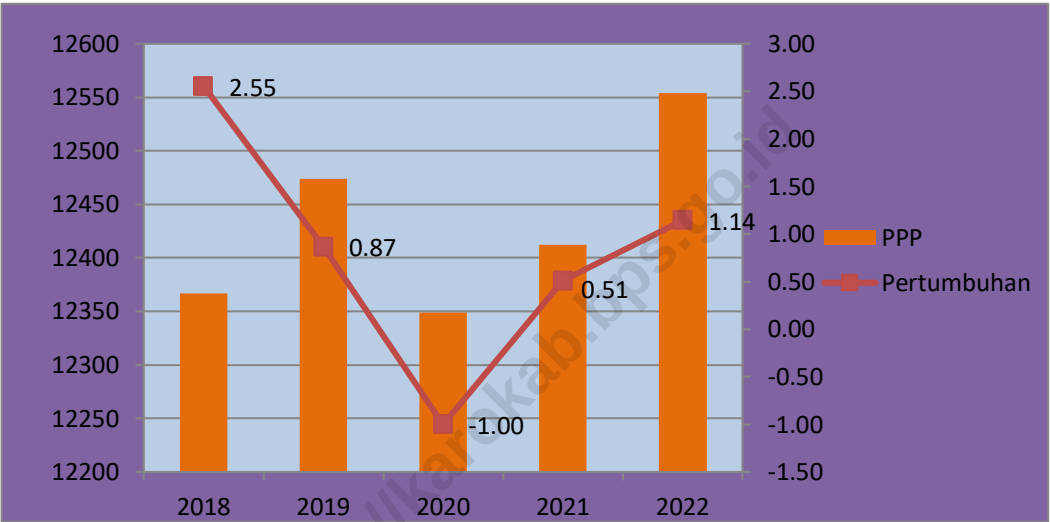
Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karenanya, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita (disesuaikan) tertinggi, yang berhasil dicapai Kota Medan yaitu sebesar Rp 15.503.000 per tahun. Kabupaten Nias Barat menempati posisi terendah dengan capaian sebesar Rp

6.152.000 per tahun. Secara umum pengeluaran per kapita per tahun (d disesuaikan) Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Nias masih rendah.

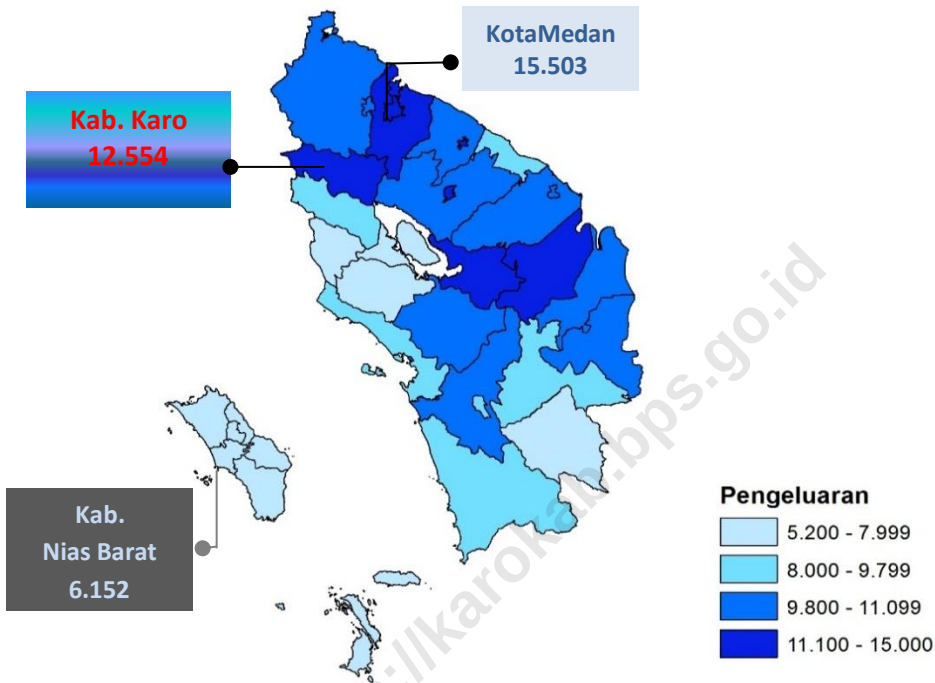
Gambar 4.8 Perkembangan Pengeluaran perKapita per Tahun di Kabupaten Karo , 2018-2022 (juta rupiah)



Tahun 2022, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karo telah mencapai Rp 12.554.000 per tahun. Pada tahun 2018 tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Karo sebesar Rp 12.367.000 rupiah perkapita per tahun, meningkat menjadi Rp12.554.000 perkapita per tahun pada tahun 2022. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Karo selama periode 2018-2022 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,81 persen per tahun. Tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp 12.349.000 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 12.474.000.

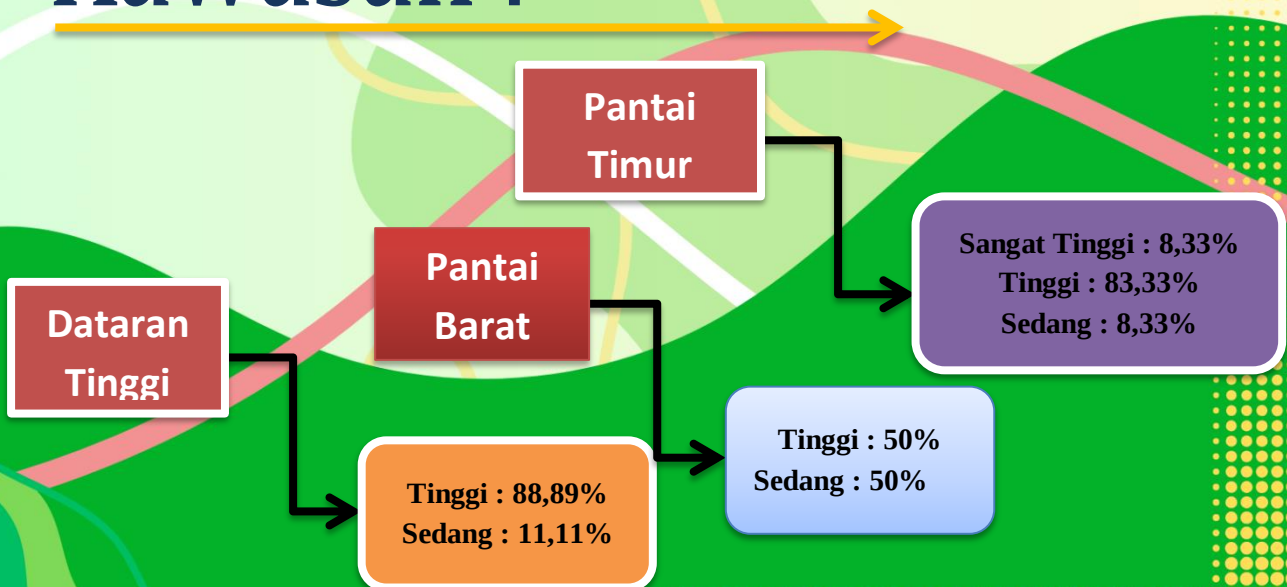
Untuk Pengeluaran Per Kapita sebagai salah satu komponen Pembangunan Manusia ini, peningkatan di Kabupaten Karo masih lumayan tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara lainnya, untuk seluruhnya, Kabupaten Karo menduduki peringkat ke-5 dari 33 Kabupaten/Kota lainnya dalam peningkatan pengeluaran per kapita per tahunnya.

Gambar 4.9 Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022 (ribu rupiah)



Di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2022 berkisar antara 6,1 juta rupiah hingga 15,5 juta rupiah. Dibandingkan tiga indikator lain, pertumbuhan pengeluaran per kapita (d disesuaikan) lebih cepat. Seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan pengeluaran per kapita pada tahun 2022 dengan rata – rata pertumbuhan 3,12 persen dari tahun 2021-2022. Kabupaten Karo memiliki pertumbuhan 1,14 persen di tahun 2022, meskipun di tahun 2022 Indonesia masih dilanda pandemi akibat Covid-19, tetapi sudah mulai ada perubahan untuk kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Status IPM menurut Kawasan :



Disparitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

5.1 Gambaran Umum Wilayah Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis¹⁰-4⁰ Lintang Utara dan 98⁰ - 100⁰ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 memiliki 33 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.

Tabel 5.1 Penggolongan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Wilayah

Pantai Timur	Dataran Tinggi	Pantai Barat
Kab. Labuhan Batu	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Nias
Kab. Asahan	Kab. Toba Samosir	Kab. Mandailing Natal
Kab. Deli Serdang	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Langkat	Kab. Dairi	Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Serdang Bedagai	Kab. Karo	Kab. Nias Selatan
Kab. Batu Bara	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Labuhan Batu Selatan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Padang Lawas
Kab. Labuhan Batu Utara	Kab. Samosir	Kab. Nias Utara
Kota Tebing Tinggi	Kota Pematangsiantar	Kab. Nias Barat
Kota Medan		Kota Sibolga
Kota Binjai		Kota Padangsidimpuan
Kota Tanjung Balai		Kota Gunungsitoli

Sumber: Bappeda Sumatera Utara

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km² atau 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur

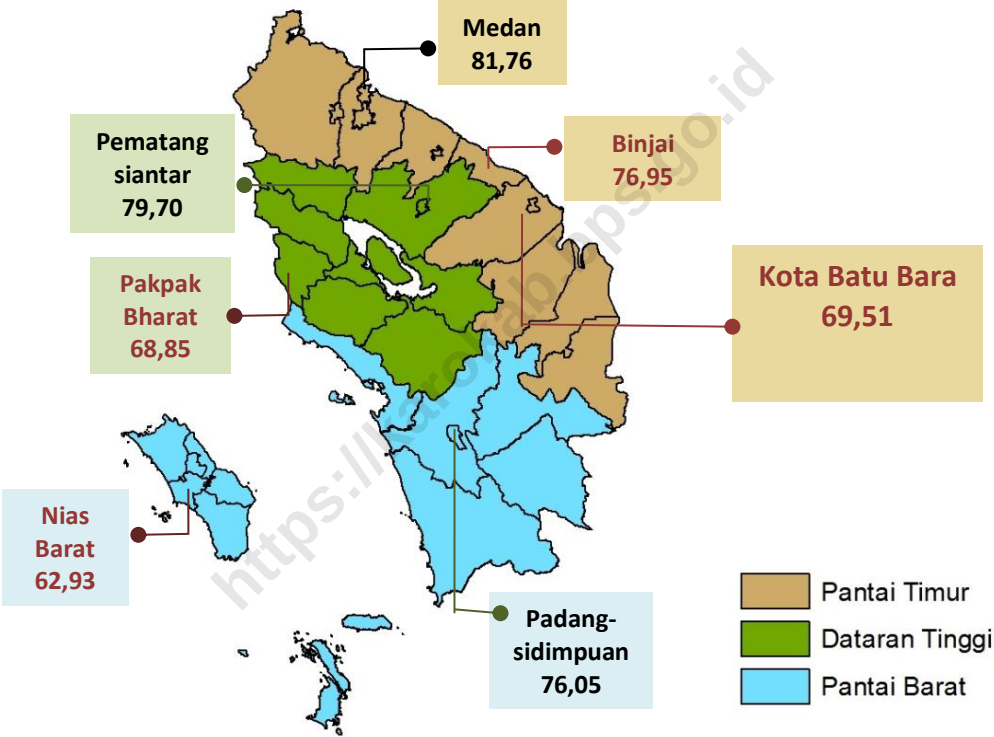
Kesenjangan pencapaian pembangunan antar daerah bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2022.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka Panjang bias memberikan dampak pada kehidupan social masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Perbandingan pencapaian pembangunan manusia antara Kawasan Pantai Barat (KPB), Kawasan Dataran Tinggi (KDT) dan Kawasan Pantai Timur (KPT) sangat menarik untuk dibahas, mengingat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di KPT mencapai 74,38 persen dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera Utara. Ketimpangan tersebut tidak terlepas dari factor kualitas sumber daya manusianya.

Berkaitan dengan pembangunan manusia, kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi antara Kawasan pantai timur, dataran tinggi dan pantai barat. Secara umum pembangunan manusia di Kawasan pantai barat lebih tertinggal dibandingkan Kawasan dataran tinggi dan pantai timur.

Gambar 5.1 IPM Tertinggi dan Terendah menurut Kawasan di Sumatera Utara, 2022



Tahun 2022, IPM Kabupaten/Kota tertinggi di Kawasan Pantai Timur telah mencapai 81,76 (Medan) dan IPM terendah 69,51 (Batubara), sedikit berbeda dengan Kawasan Dataran Tinggi IPM tertinggi mencapai 79,70 (Pematang Siantar) dan IPM terendah 68,85 (Pakpak Barat). Sementara di Kawasan Pantai Barat, IPM Kabupaten/Kota tertinggi hanya 76,05 (Padang sidempuan) dan IPM terendah hanya 62,93 (Nias Barat). Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa

kesenjangan pembangunan manusia di Kawasan Pantai Barat lebih tinggi dibandingkan Kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

Capaian pembangunan manusia di Kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Timur lebih maju dibandingkan dengan capaian di Kawasan Pantai Barat. Tahun 2022, sebanyak 77,78 persen Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi dan 83,33 persen Kabupaten/Kota di Kawasan pantai Timur telah berada pada status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara di Kawasan Pantai Barat hanya 33,33 persen Kabupaten/Kota yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Tabel 5.2 Persentase Status IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Kawasan, 2022

Kawasan	Status Pembangunan Manusia (%)			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Pantai Timur	8,33	83,33	8,33	0
Dataran Tinggi	0	88,89	11,11	0
Pantai Barat	0	50	50	0

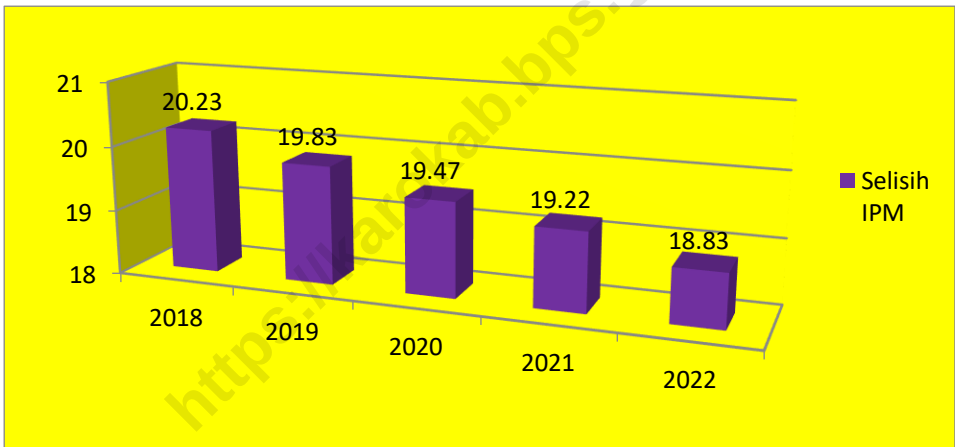
Persoalan pembangunan manusia yang masih “rendah” tidak lagi dijumpai baik pada Kabupaten di Kawasan Pantai Barat, Di Kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Timur, tidak ada Kabupaten/Kota yang status pembangunan manusia “rendah”. Pembangunan manusia yang “sedang” pada tahun 2021 di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Gunung Sitoli yang terletak di Kawasan Pantai Barat sudah meningkat menjadi pembangunan manusia “tinggi”. Demikian juga di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terletak di Kawasan Dataran Tinggi sudah meningkat menjadi pembangunan manusia “tinggi”

Disparitas yang cukup tinggi tidak bias dibiarkan berlanjut kegenerasi yang akan datang. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Sumatera Utara adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Sumatera Utara yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

Selama kurun waktu lima tahun, kesenjangan pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami penurunan. Selama tahun 2018-2022, terjadi penurunan kesenjangan antara angka IPM tertinggi dan terendah. Tahun 2022 selisih IPM Kabupaten/Kota tertinggi dengan terendah sebesar 18,83 lebih rendah dari tahun 2021.

Gambar 5.2 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2018-2022

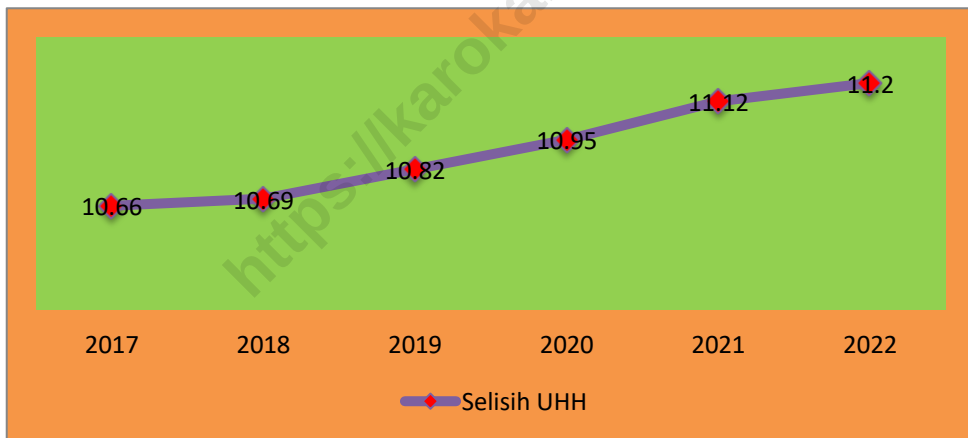


Penurunan kesenjangan IPM cukup menggembirakan, namun upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan pembangunan manusia di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan signifikan antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil. Bagai sebuah paradoks, peningkatan yang signifikan di suatu wilayah, akan memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.

a. Kesenjangan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bagian vital dari kehidupan manusia. Kesehatan masyarakat Sumatera Utara saat ini semakin membaik. Seiring dengan kesehatan masyarakat Sumatera Utara yang semakin membaik, kesenjangan kesehatan antar Kabupaten/Kota pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara UHH tertinggi dengan UHH terendah. Tahun 2017 selisih UHH Kabupaten/Kota tertinggi dengan terendah sebesar 10,66 naik menjadi 11,12 pada tahun 2022. RentangkomponenUHHcenderungmenyempitsetiap tahunnya.

Gambar 5.3 Perkembangan Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022



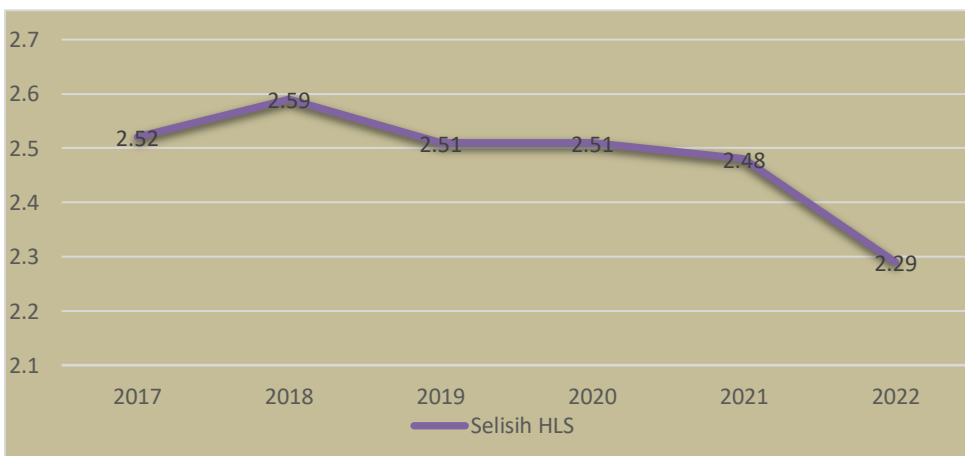
Kabupaten/Kota dengan UHH terendah yaitu Kabupaten Mandailing Natal sebesar 63,05 tahun, sedangkan UHH tertinggi dicapai Kota Pematang Siantar sebesar 74,25 tahun. Penurunan kesenjangan UHH antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara cukup baik, namun kesenjangan sebesar 11,20 pada tahun 2022 tergolong masih tinggi. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan agar kesenjangan kesehatan semakin kecil.

b. Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pembangunan manusia di bidang Pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan. Seiring dengan perbaikan kualitas pendidikan, dalam kurun waktu 2017-2022, pendidikan di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang baik. Di semua Kabupaten/Kota, Harapan lama sekolah penduduk 7 tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kesenjangan capaian pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara cenderung menurun walaupun ada sedikit kenaikan di tahun 2022. Tahun 2017 selisih HLS Kabupaten/Kota tertinggi dengan terendah sebesar 2,52 turun menjadi 2,29 pada tahun 2022. Selisih yang semakin mengecil sejak 2017 hingga 2022, walaupun di tahun 2018 kesenjangan sedikit meningkat.

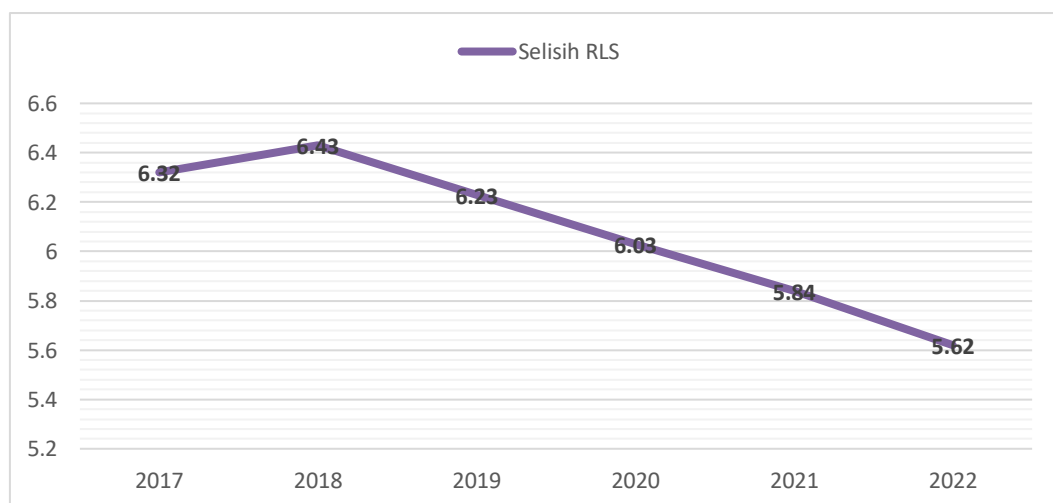
Gambar 5.4 Perkembangan Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022



Kesenjangan angka harapan lama sekolah di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias. Pada tahun 2022, rata-rata penduduk usia 7 di Kota Medan berpotensi menempuh Pendidikan selama 14,77 tahun. Di tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Nias Selatan hanya berpotensi menempuh Pendidikan selama 12,48 tahun. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah semakin merata di Sumatera Utara, namun tetap perlu ditingkatkan.

Pola yang sedikit berbeda terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah. Selama hampir setengah dasawarsa, kesenjangan RLS tertinggi dengan terendah yang terjadi di Sumatera Utara tidak stabil. Tahun 2017 selisih RLS Kabupaten/Kota tertinggi dengan terendah sebesar 6,32 tahun naik menjadi 6,43 tahun pada tahun 2018. Tahun 2017 dan 2018 kesenjangan RLS sedikit meningkat, kemudian menurun lagi di tahun 2019 menjadi 6,23 tahun. Walaupun secara keseluruhan dari tahun 2017-2022 kesenjangan rata-rata lama sekolah menurun, namun ada peningkatan di tahun 2018 dibandingkan 2017. Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian agar di tahun mendatang rata-rata lama sekolah semakin meningkat dan kesenjangan antar daerah semakin kecil.

Gambar 5.5 Perkembangan Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022



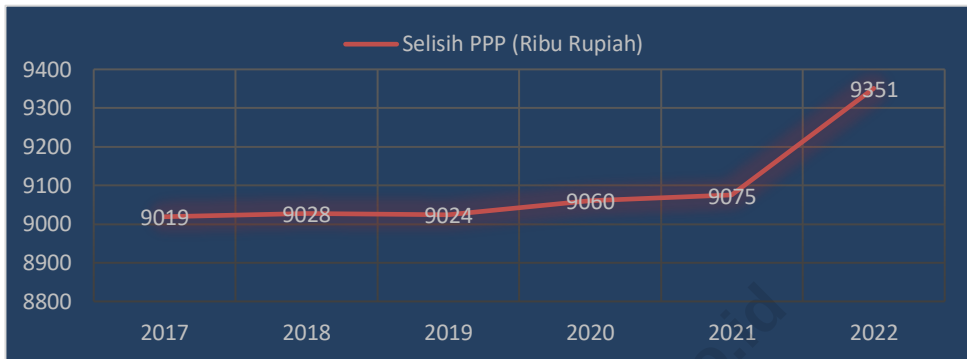
Kesenjangan rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias. Tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Medan yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh Pendidikan selama 11,50 tahun. Sementara penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Nias, rata-rata hanya menempuh Pendidikan selama 5,88 tahun. Oleh karena itu, pemerataan sarana dan akses Pendidikan harus digalakkan agar kesenjangan semakin kecil.

c. Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2017 hingga 2022, angka pengeluaran per kapita Sumatera Utara terus meningkat. Namun, hal itu masih menyisakan persoalan kesenjangan antar wilayah.

Berbeda dengan dimensi Pendidikan dan kesehatan yang kesenjangan cenderung menurun, untuk pengeluaran per kapita kesenjangan cenderung meningkat. Tahun 2017 selisih pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Kota Medan dengan terendah yaitu Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 9.002.000. Namun pada tahun 2022 selisih pengeluaran per kapita naik menjadi Rp 9.075.000. Artinya, kesenjangan pengeluaran per kapita di Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat mencapai 9,075 juta rupiah. Rentang pengeluaran per kapita di Sumatera Utara cenderung melebar.

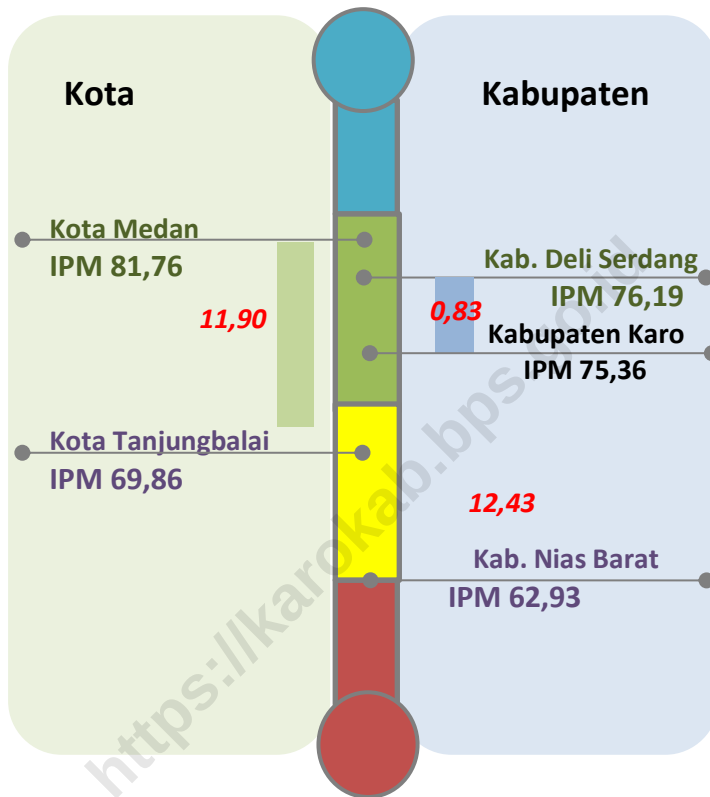
Gambar 5.6 Perkembangan Selisih Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2022



5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota

Hal yang lebih menarik jika membandingkan pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota memiliki daya Tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya Kota jauh lebih maju dibanding Kabupaten.

Gambar 5.7 Perbandingan IPM Kabupaten dengan Kota di Sumatera Utara Tertinggi dan Terendah, 2022



Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota, meliputi 8 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten. Capaian pembangunan manusia di kota memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten. Tahun 2022, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kota adalah Kota Medan dengan IPM mencapai 81,76. Sementara itu, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kabupaten pada tahun 2022 adalah Kabupaten Deli Serdang dengan angka IPM sebesar 76,19. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara, capaian pembangunan manusia untuk wilayah Kota yang paling rendah yaitu Kota Tanjung balai dengan IPM sebesar 69,86. Capaian IPM terendah untuk wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Nias Barat dengan IPM hanya sebesar 62,93.

Kesenjangan pembangunan manusia antara Kota dengan Kabupaten tidak terlalu signifikan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Tahun 2022, IPM Kota Medan

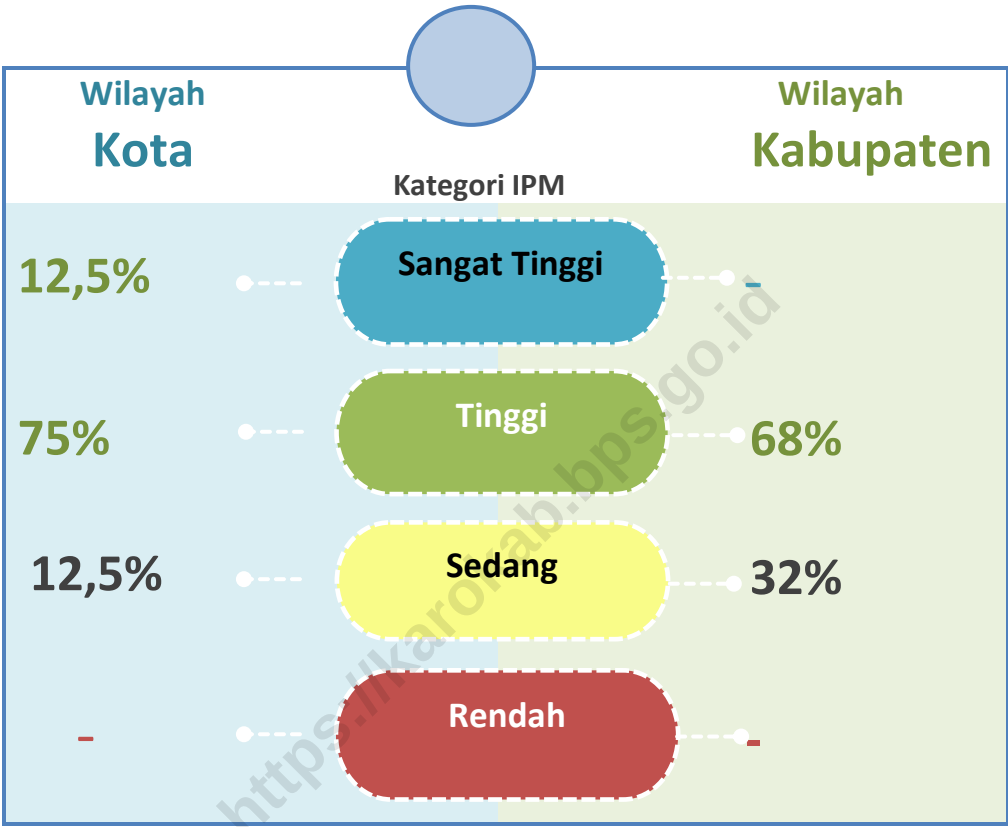
dengan Kabupaten Karo berjarak 6,40. Bandingkan dengan kondisi di wilayah Kabupaten. Jarak IPM antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Nias Barat mencapai 13,26. Artinya, kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di Kota hanya sedikit lebih baik dibanding apa yang terjadi di wilayah Kabupaten. Hal ini diduga karena di Sumatera Utara terdapat Kota yang jaraknya cukup jauh dari ibu Kota Provinsi.

Selama kurun waktu 2017-2022, perkembangan tingkat kesenjangan yang terjadi di Kota dan Kabupaten secara umum cenderung turun. Jarak antara IPM tertinggi dan terendah di Kota turun dari 12,25 pada tahun 2017 menjadi 11,90 pada tahun 2022. Hal yang sama terjadi di Kabupaten dengan kesenjangan pembangunan manusia yang juga cenderung turun. Tahun 2014, kesenjangan antara IPM tertinggi dan terendah di Kabupaten berjarak 14,44, pada tahun 2022 jaraknya telah mengecil menjadi hanya 13,26 poin.

Namun jika dilihat dari status pembangunan manusia, menunjukkan ada sedikit perbedaan kemajuan antara kota dengan kabupaten di Sumatera Utara. Tahun 2022, dari delapan wilayah Kota di Sumatera Utara, yang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” sudah ada 1 kota. Dan kota yang berstatus “tinggi” telah mencapai 75 persen (6 Kota). Sementara di wilayah Kabupaten, dari 25 Kabupaten terdapat 15 Kabupaten atau sekitar 60 persen yang berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Di wilayah Kabupaten, mayoritas status pembangunan manusia “sedang”, yaitu sebanyak 40 persen dari total Kabupaten di Sumatera Utara. Sementara di wilayah Kota, hanya 12,5 persen kota yang masih status pembangunan “sedang”.

Perbedaan kemajuan ini, juga terlihat dari tidak terdapat Kota dan Kabupaten dengan status pembangunan manusia “rendah”. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, sudah ada kemajuan untuk tingkat Kabupaten. Terdapat satu Kota dan dua Kabupaten yang berubah status pembangunan manusia dari “sedang” menjadi “tinggi”. Hal ini tentu mempersempit kesenjangan pembangunan antara Kota dan Kabupaten.

Gambar 5.8 Perbandingan IPM Kabupaten dengan Kota di Sumatera Utara Menurut Status IPM, 2022



Fenomena kesenjangan di Kota dan Kabupaten juga terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Fenomena yang cukup menarik ternyata kesenjangan yang terjadi di Kota lebih besar jika dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di Kabupaten. Hal ini terjadi pada semua dimensi, kecuali dimensi pendidikan.

Kesenjangan AHH yang terjadi di Kota hampir sama dibandingkan kesenjangan AHH di Kabupaten. Tahun 2022, jarak antara angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kota sebesar 10,38 tahun. Sementara itu, perbedaan capaian angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kabupaten 9,02 tahun. Perbaikan kesenjangan AHH di Kabupaten cenderung lebih cepat dibandingkan dengan di Kota.

Dimensi berikutnya yang cukup penting adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kesenjangan harapan lama sekolah yang terjadi di Kota hamper sama dibandingkan kesenjangan HLS di Kabupaten. Tahun 2022, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di Kota 1,87 tahun. Sedangkan jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di Kabupaten 1,41 tahun.

Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di Kabupaten hamper dua kali lebih parah dibandingkan kesenjangan di Kota. Tahun 2022 perbedaan antara rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di Kota hanya 2,86 tahun. Sementara perbedaan di Kabupaten mencapai 4,70 tahun. Tercatat bahwa selama tahun 2017 hingga 2022, kesenjangan rata-rata lama sekolah di Kabupatendan Kota sama-sama berfluktuasi.

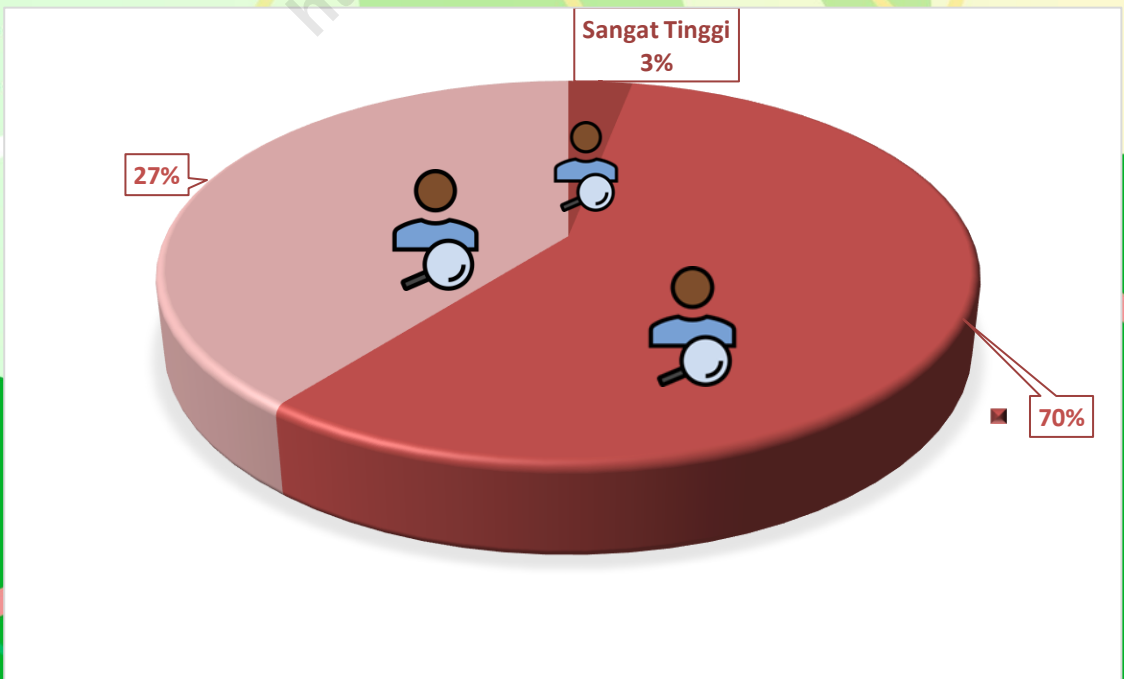
Kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di Kabupaten dengan angka yang hamper mendekati. Walaupun perkembangan kesenjangan keduanya cenderung semakin membaik selama dua tahun terakhir, dimensi ini tetap perlu mendapat perhatian khusus agar kesenjangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.

BAB

6

Kesimpulan

Status Pembangunan Manusia (%)



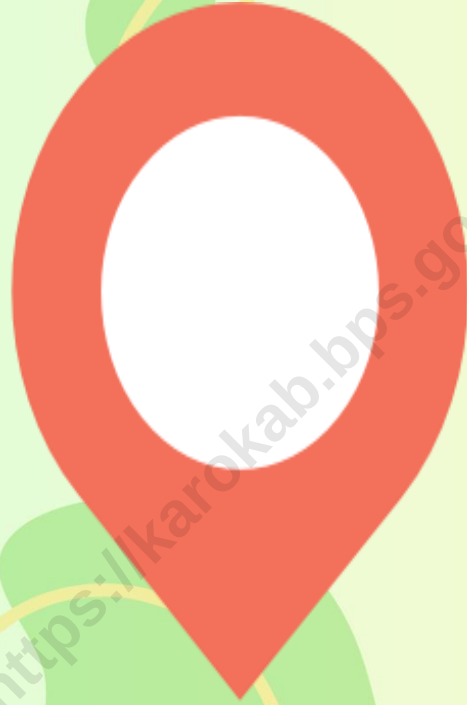
6.1 Kesimpulan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis terhadap data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik tren 2017-2022 maupun spasialnya didapat beberapa kesimpulan diantaranya:

- Tren pembangunan manusia di Sumatera Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan juga terjadi di tahun 2022. Capaian IPM Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah 72,71 dengan pertumbuhan sebesar 0,98 persen dari tahun 2021.
- Tren Pembangunan Manusia di Kabupaten Karo juga meningkat setiap tahunnya, walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang kecil. Capaian IPM Kabupaten Karo pada tahun 2022 adalah 75,36 dengan pertumbuhan sebesar 0,7 persen dari tahun 2021.
- Peningkatan terjadi pada seluruh komponen IPM Kabupaten Karo ,yaitu:
 1. Komponen kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72,03 tahun di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,58 tahun (tumbuh 0,63 persen).
 2. Komponen Pendidikan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi 12,95 tahun (tumbuh 1,4 persen), dan rata-rata lama sekolah menjadi 10,02 tahun (tumbuh 0,2 persen) dibanding tahun 2021.
 3. Komponen ekonomi yang ditunjukkan dengan menurunnya pengeluaran perkapita (d disesuaikan) menjadi 12,554 juta pada tahun 2022 (tumbuh-1,14 persen) dibanding tahun 2021.

- Capaian IPM pada tahun 2022 tertinggi di level kabupaten/kota di Sumatera Utara diraih oleh Kota Medan dengan IPM sebesar 81,76 dan capaian terendah IPM berada di Kabupaten Nias Barat dengan capaian 62,93.
- Indikator angka harapan hidup tertinggi dicapai Kota Pematang Siantar (74,25 tahun), dan terendah Kabupaten Mandailing Natal (63,05 tahun).
- Indikator angka harapan lama sekolah tertinggi dicapai Kota Medan (14,77 tahun) dan terendah Kabupaten Nias Selatan (12,48 tahun). Indikator rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai Kota Medan (11,50 tahun) dan terendah di Kabupaten Nias (5,88 tahun).
- Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi dicapai Kota Medan (15,503 juta) dan terendah Kabupaten Nias Barat (6,152 juta).
- Pertumbuhan capaian IPM tahun 2022 tertinggi yaitu Kabupaten Nias Barat dengan pertumbuhan sebesar 1.52 persen, sedangkan Kabupaten Simalungun memiliki pertumbuhan paling lambat karena nilai pertumbuhan 0,50 persen (angka IPM hanya naik 0,37 poin).

LAMPIRAN



<https://karokab.bps.go.id>



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	70,06	13,04	5,88	7.196	63,69
Mandailing Natal	63,05	13,85	8,76	10.061	68,05
Tapanuli Selatan	65,28	13,37	9,34	11.727	70,92
Tapanuli Tengah	67,58	13,24	8,86	10.495	70,31
Tapanuli Utara	69,16	13,72	10,00	11.892	74,14
Toba Samosir	70,76	13,58	10,58	12.475	75,96
Labuhan Batu	70,37	12,95	9,40	11.474	72,92
Asahan	68,73	12,63	8,82	11.515	71,13
Simalungun	71,78	12,81	9,63	11.524	73,77
Dairi	69,64	13,24	9,72	10.740	72,56
Karo	72,03	12,95	10,02	12.554	75,36
Deli Serdang	72,07	13,38	10,27	12.657	76,19
Langkat	69,39	13,26	8,68	11.439	71,86
Nias Selatan	69,21	12,48	6,23	7.195	63,17
Humbahas	70,02	13,31	10,00	8.250	70,32
Pakpak Barat	66,44	13,89	9,39	8.558	68,85
Samosir	71,82	13,50	9,46	8.991	71,67
Serdang Bedagai	69,21	12,63	8,71	11.499	71,21
Batu Bara	67,55	12,93	8,26	10.755	69,51
Paluta	67,53	13,23	9,46	10.447	70,93
Padang Lawas	67,43	13,41	9,31	9.207	69,58
Labusel	69,16	13,12	8,92	11.751	72,16
Labura	69,91	13,29	8,64	12.258	72,77
Nias Utara	69,90	13,06	6,78	6.575	63,75
Nias Barat	69,43	12,97	6,97	6.152	62,93
Kota Sibolga	69,77	13,30	10,43	12.135	74,74
Kota TanjungBalai	63,87	12,90	9,55	11.589	69,86
Kota P. Siantar	74,25	14,59	11,31	12.744	79,70
Kota Tebing Tinggi	71,29	12,91	10,65	13.144	76,17
Kota Medan	73,58	14,77	11,50	15.503	81,76
Kota Binjai	72,79	13,87	11,18	11.358	76,95
Kota P. Sidempuan	69,84	14,58	11,11	11.337	76,05
Kota GunungSitoli	71,71	13,77	8,64	8.434	70,23
SUMATERA UTARA	69,61	13,31	9,71	10.848	72,71

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,78	12,84	5,64	6.995	62,74
Mandailing Natal	62,65	13,61	8,63	9.771	67,19
Tapanuli Selatan	64,97	13,35	9,29	11.304	70,33
Tapanuli Tengah	67,24	13,07	8,84	10.138	69,61
Tapanuli Utara	68,76	13,7	9,99	11.710	73,76
Toba Samosir	70,29	13,46	10,57	12.224	75,39
Labuhan Batu	69,95	12,74	9,25	11.212	72,09
Asahan	68,37	12,61	8,8	11.030	70,49
Simalungun	71,37	12,79	9,61	11.376	73,4
Dairi	69,19	13,11	9,59	10.504	71,84
Karo	71,58	12,77	10	12.412	74,83
Deli Serdang	71,77	13,36	10,1	12.291	75,53
Langkat	68,97	13,24	8,66	11.142	71,35
Nias Selatan	68,86	12,27	6,06	7.041	62,35
Humbahas	69,51	13,29	9,71	8.016	69,41
Pakpak Barat	65,96	13,87	9,14	8.254	67,94
Samosir	71,41	13,48	9,44	8.504	70,83
Serdang Bedagai	68,82	12,61	8,69	11.017	70,56
Batu Bara	67,13	12,64	8,07	10.539	68,58
Paluta	67,22	13,04	9,38	10.055	70,11
Padang Lawas	67,13	13,27	9,02	8.921	68,64
Labusel	68,81	13,01	8,9	11.562	71,69
Labura	69,56	13,19	8,41	11.840	71,87
Nias Utara	69,55	13,04	6,77	6.155	62,82
Nias Barat	69,08	12,95	6,69	5.924	61,99
Kota Sibolga	69,25	13,28	10,41	11.540	73,94
Kota TanjungBalai	63,44	12,62	9,45	11.225	68,94
Kota P. Siantar	73,77	14,57	11,29	12.436	79,17
Kota Tebing Tinggi	70,95	12,73	10,44	12.939	75,42
Kota Medan	73,23	14,75	11,48	14.999	81,21
Kota Binjai	72,45	13,63	10,94	11.063	76,01
Kota P. Sidempuan	69,5	14,56	11,09	10.965	75,48
Kota GunungSitoli	71,32	13,75	8,62	8.134	69,61
SUMATERA UTARA	69,23	13,27	9,58	10.499	72,00

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,75	12,57	5,36	6.898	61,93
Mandailing Natal	62,60	13,32	8,62	9.684	66,79
Tapanuli Selatan	64,91	13,24	9,28	11.236	70,12
Tapanuli Tengah	67,15	13,06	8,62	10.071	69,23
Tapanuli Utara	68,63	13,69	9,85	11.648	73,47
Toba Samosir	70,08	13,45	10,52	12.154	75,16
Labuhan Batu	69,93	12,73	9,24	11.150	72,01
Asahan	68,26	12,60	8,79	10.890	70,29
Simalungun	71,22	12,78	9,60	11.308	73,25
Dairi	69,00	13,10	9,58	10.350	71,57
Karo	71,40	12,76	9,79	12.349	74,43
Deli Serdang	71,73	13,35	10,09	12.225	75,44
Langkat	68,80	13,05	8,65	11.071	71,00
Nias Selatan	68,74	12,23	5,85	6.974	61,89
Humbahas	69,27	13,28	9,54	7.850	68,87
Pakpak Barat	65,74	13,86	9,03	8.170	67,59
Samosir	71,27	13,47	9,43	8.422	70,63
Serdang Bedagai	68,68	12,60	8,54	10.950	70,24
Batu Bara	66,96	12,63	8,06	10.410	68,36
Paluta	67,17	12,87	9,37	9.987	69,85
Padang Lawas	67,09	13,03	9,01	8.807	68,25
Labusel	68,71	13,00	8,75	11.495	71,40
Labura	69,46	13,04	8,40	11.779	71,61
Nias Utara	69,43	13,03	6,58	6.064	62,36
Nias Barat	68,96	12,94	6,49	5.830	61,51
Kota Sibolga	69,01	13,16	10,40	11.473	73,63
Kota TanjungBalai	63,27	12,50	9,44	11.132	68,65
Kota P. Siantar	73,55	14,45	11,16	12.372	78,75
Kota Tebing Tinggi	70,87	12,72	10,31	12.876	75,17
Kota Medan	73,14	14,74	11,39	14.890	80,98
Kota Binjai	72,38	13,62	10,93	10.997	75,89
Kota P. Sidempuan	69,41	14,54	11,00	10.856	75,22
Kota GunungSitoli	71,19	13,74	8,61	7.980	69,31
SUMATERA UTARA	69,10	13,23	9,54	10.420	71,77

Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2019

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,68	12,39	5,15	7.042	61,65
Mandailing Natal	62,51	13,17	8,36	9.900	66,52
Tapanuli Selatan	64,82	13,12	8,97	11.410	69,75
Tapanuli Tengah	67,08	12,79	8,48	10.175	68,86
Tapanuli Utara	68,46	13,68	9,71	11.791	73,33
Toba Samosir	69,93	13,28	10,36	12.375	74,92
Labuhan Batu	69,86	12,67	9,23	11.193	71,94
Asahan	68,11	12,59	8,49	10.983	69,92
Simalungun	71,07	12,77	9,36	11.422	72,98
Dairi	68,79	13,09	9,34	10.602	71,42
Karo	71,27	12,75	9,62	12.474	74,25
Deli Serdang	71,61	13,34	10,08	12.317	75,43
Langkat	68,59	12,81	8,64	11.208	70,76
Nias Selatan	68,58	12,22	5,53	7.105	61,59
Humbahas	69,06	13,27	9,53	7.902	68,83
Pakpak Barat	65,59	13,85	8,73	8.402	67,47
Samosir	71,16	13,46	9,15	8.654	70,55
Serdang Bedagai	68,46	12,59	8,53	11.061	70,21
Batu Bara	66,75	12,62	8,02	10.575	68,35
Paluta	67,06	12,47	9,10	10.194	69,29
Padang Lawas	66,98	13,02	8,69	9.100	68,16
Labusel	68,64	12,99	8,74	11.553	71,39
Labura	69,37	12,82	8,36	11.957	71,43
Nias Utara	69,29	12,78	6,25	6.245	61,98
Nias Barat	68,82	12,71	6,14	6.009	61,14
Kota Sibolga	68,77	13,15	10,18	11.656	73,41
Kota TanjungBalai	63,02	12,49	9,26	11.383	68,51
Kota P. Siantar	73,33	14,21	11,15	12.571	78,57
Kota Tebing Tinggi	70,76	12,71	10,28	12.895	75,08
Kota Medan	72,98	14,73	11,38	15.033	80,97
Kota Binjai	72,25	13,61	10,77	11.260	75,89
Kota P. Sidempuan	69,15	14,53	10,70	11.181	75,06
Kota GunungSitoli	71,02	13,73	8,58	8.058	69,30
SUMATERA UTARA	68,95	13,15	9,45	10.649	71,74

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,43	12,13	4,94	6.941	60,82
Mandailing Natal	62,24	13,15	8,11	9.653	65,83
Tapanuli Selatan	64,55	13,10	8,70	11.209	69,10
Tapanuli Tengah	66,82	12,66	8,29	10.067	68,27
Tapanuli Utara	68,11	13,66	9,65	11.607	72,91
Toba Samosir	69,59	13,26	10,34	12.095	74,48
Labuhan Batu	69,60	12,60	9,04	11.053	71,39
Asahan	67,79	12,56	8,47	10.735	69,49
Simalungun	70,75	12,75	9,18	11.311	72,49
Dairi	68,41	13,07	9,15	10.492	70,89
Karo	70,97	12,73	9,55	12.367	73,91
Deli Serdang	71,31	13,32	9,92	12.132	74,92
Langkat	68,22	12,75	8,52	11.088	70,27
Nias Selatan	68,24	12,20	5,20	6.941	60,75
Humbahas	68,69	13,25	9,28	7.630	67,96
Pakpak Barat	65,27	13,83	8,48	8.099	66,63
Samosir	70,87	13,44	9,14	8.348	69,99
Serdang Bedagai	68,08	12,57	8,51	10.737	69,69
Batu Bara	66,38	12,52	7,84	10.385	67,67
Paluta	66,77	12,42	9,06	9.912	68,77
Padang Lawas	66,69	13,00	8,67	8.772	67,59
Labusel	68,39	12,97	8,71	11.280	70,98
Labura	69,09	12,80	8,35	11.730	71,08
Nias Utara	68,98	12,58	6,09	6.041	61,08
Nias Barat	68,50	12,66	6,00	5.817	60,42
Kota Sibolga	68,36	13,13	9,91	11.405	72,65
Kota TanjungBalai	62,60	12,47	9,24	11.102	68,00
Kota P. Siantar	72,93	14,02	11,08	12.290	77,88
Kota Tebing Tinggi	70,47	12,68	10,24	12.434	74,50
Kota Medan	72,64	14,72	11,37	14.845	80,65
Kota Binjai	71,95	13,59	10,75	10.750	75,21
Kota P. Sidempuan	68,73	14,51	10,63	10.795	74,38
Kota GunungSitoli	70,67	13,71	8,41	7.639	68,33
SUMATERA UTARA	68,61	13,14	9,34	10.391	71,18

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,18	12,12	4,93	6.629	60,21
Mandailing Natal	61,97	12,99	8,00	9.385	65,13
Tapanuli Selatan	64,28	13,08	8,67	10.955	68,69
Tapanuli Tengah	66,66	12,65	8,28	9.852	67,96
Tapanuli Utara	67,86	13,65	9,46	11.407	72,38
Toba Samosir	69,36	13,25	10,10	11.846	73,87
Labuhan Batu	69,44	12,59	9,01	10.760	71,00
Asahan	67,57	12,53	8,46	10.477	69,10
Simalungun	70,53	12,71	8,95	11.055	71,83
Dairi	68,13	13,06	8,90	10.395	70,36
Karo	70,77	12,71	9,54	12.059	73,53
Deli Serdang	71,11	12,90	9,70	11.891	73,94
Langkat	67,94	12,72	8,51	10.784	69,82
Nias Selatan	68,00	11,98	4,95	6.792	59,85
Humbahas	68,41	13,24	9,10	7.412	67,30
Pakpak Barat	65,05	13,82	8,47	7.913	66,25
Samosir	70,68	13,43	8,95	8.163	69,43
Serdang Bedagai	67,79	12,55	8,35	10.551	69,16
Batu Bara	66,10	12,49	7,83	10.084	67,20
Paluta	66,58	12,41	8,93	9.737	68,34
Padang Lawas	66,50	12,99	8,43	8.445	66,82
Labusel	68,14	12,95	8,70	10.892	70,48
Labura	68,91	12,79	8,34	11.510	70,79
Nias Utara	68,77	12,57	6,08	5.835	60,57
Nias Barat	68,28	12,61	5,78	5.594	59,56
Kota Sibolga	68,05	13,12	9,87	11.221	72,28
Kota TanjungBalai	62,28	12,44	9,14	10.778	67,41
Kota P. Siantar	72,63	14,01	11,06	12.106	77,54
Kota Tebing Tinggi	70,28	12,66	10,09	12.055	73,90
Kota Medan	72,40	14,45	11,25	14.613	79,98
Kota Binjai	71,75	13,58	10,58	10.487	74,65
Kota P. Sidempuan	68,41	14,50	10,56	10.464	73,81
Kota GunungSitoli	70,42	13,69	8,40	7.300	67,68
SUMATERA UTARA	68,37	13,10	9,25	10.036	70,57

Lampiran 7. Tren Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017-2022

Kabupaten/Kota	IPM					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	
Nias	60,21	60,82	61,65	61,93	62,74	63,69
Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52	66,79	67,19	68,05
Tapanuli Selatan	68,69	69,10	69,75	70,12	70,33	70,92
Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86	69,23	69,61	70,31
Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
Toba Samosir	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96
Labuhan Batu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09	72,92
Asahan	69,10	69,49	69,92	70,29	70,49	71,13
Simalungun	71,83	72,49	72,98	73,25	73,4	73,77
Dairi	70,36	70,89	71,42	71,57	71,84	72,56
Karo	73,53	73,91	74,25	74,43	74,83	75,36
Deli Serdang	73,94	74,92	75,43	75,44	75,53	76,19
Langkat	69,82	70,27	70,76	71,00	71,35	71,86
Nias Selatan	59,85	60,75	61,59	61,89	62,35	63,17
Humbahas	67,30	67,96	68,83	68,87	69,41	70,32
Pakpak Barat	66,25	66,63	67,47	67,59	67,94	68,85
Samosir	69,43	69,99	70,55	70,63	70,83	71,67
Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21	70,24	70,56	71,21
Batu Bara	67,20	67,67	68,35	68,36	68,58	69,51
Paluta	68,34	68,77	69,29	69,85	70,11	70,93
Padang Lawas	66,82	67,59	68,16	68,25	68,64	69,58
Labusel	70,48	70,98	71,39	71,40	71,69	72,16
Labura	70,79	71,08	71,43	71,61	71,87	72,77
Nias Utara	60,57	61,08	61,98	62,36	62,82	63,75
Nias Barat	59,56	60,42	61,14	61,51	61,99	62,93
Kota Sibolga	72,28	72,65	73,41	73,63	73,94	74,74
Kota TanjungBalai	67,41	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86
Kota P. Siantar	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17	79,70
Kota Tebing Tinggi	73,90	74,50	75,08	75,17	75,42	76,17
Kota Medan	79,98	80,65	80,97	80,98	81,21	81,76
Kota Binjai	74,65	75,21	75,89	75,89	76,01	76,95
Kota P. Sidempuan	73,81	74,38	75,06	75,22	75,48	76,05
Kota GunungSitoli	67,68	68,33	69,30	69,31	69,61	70,23
SUMATERA UTARA	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71

Lampiran 8. IPM, Pertumbuhan IPM, Peringkat dan Status IPM menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan (%)	Peringkat IPM	Status
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
Nias	63,69	1,51	31	Sedang
Mandailing Natal	68,05	1,28	29	Sedang
Tapanuli Selatan	70,92	0,84	20	Tinggi
Tapanuli Tengah	70,31	1,01	23	Tinggi
Tapanuli Utara	74,14	0,52	10	Tinggi
Toba Samosir	75,96	0,76	7	Tinggi
Labuhan Batu	72,92	1,15	12	Tinggi
Asahan	71,13	0,91	18	Tinggi
Simalungun	73,77	0,50	11	Tinggi
Dairi	72,56	1,00	14	Tinggi
Karo	75,36	0,71	8	Tinggi
Deli Serdang	76,19	0,87	4	Tinggi
Langkat	71,86	0,71	16	Tinggi
Nias Selatan	63,17	1,32	32	Sedang
Humbahas	70,32	1,31	24	Tinggi
Pakpak Barat	68,85	1,34	28	Sedang
Samosir	71,67	1,19	17	Tinggi
Serdang Bedagai	71,21	0,92	19	Tinggi
Batu Bara	69,51	1,36	26	Sedang
Paluta	70,93	1,17	21	Tinggi
Padang Lawas	69,58	1,37	27	Sedang
Labusel	72,16	0,66	15	Tinggi
Labura	72,77	1,25	13	Tinggi
Nias Utara	63,75	1,48	30	Sedang
Nias Barat	62,93	1,52	33	Sedang
Kota Sibolga	74,74	1,08	9	Tinggi
Kota Tanjung Balai	69,86	1,33	25	Sedang
Kota P. Siantar	79,70	0,67	2	Tinggi
Kota Tebing Tinggi	76,17	0,99	6	Tinggi
Kota Medan	81,76	0,68	1	Sangat Tinggi
Kota Binjai	76,95	1,24	3	Tinggi
Kota P. Sidempuan	76,05	0,76	5	Tinggi
Kota Gunung Sitoli	70,23	0,89	22	Tinggi
SUMATERA UTARA	72,71	0,99	15	Tinggi

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting No 112A, Raya, Berastagi -22152

Telp : (0628) 92675, Fax : (0628) 92851

Homepage : <http://karokab.bps.go.id> Email : bps1211@bps.go.id